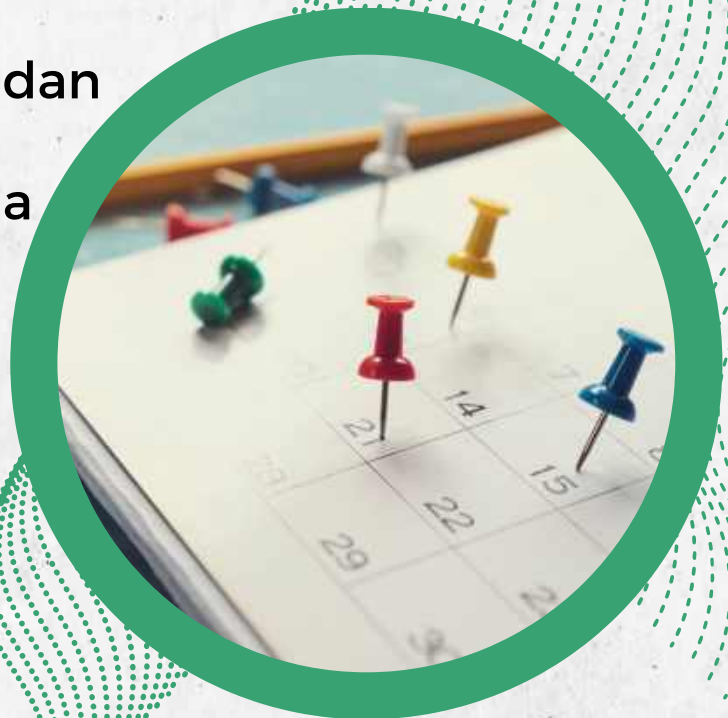




Kabupaten Kutai Kartanegara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia



+62 811-541-5581



www.bkpsdm.kukarkab.go.id



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh **stakeholder** yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (**performance improvement**). Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 25 Februari 2025
KEPALA BKPSDM,



H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban unit organisasi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang termuat dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis. Berdasarkan dokumen renstra, sasaran BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut : **“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah”**

Dalam Perjanjian Kinerja 2024 terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama tambahan yaitu :

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP;
5. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau;
6. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD;
7. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)
8. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP;
9. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD;
10. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah;

11. Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah;
12. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
13. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
14. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP;
15. Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK;
16. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;
17. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan;
18. Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD;
19. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
20. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
21. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
22. Peningkatan Prestasi Inovasi;
23. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor;
24. Meningkatnya Pengamanan Aset;
25. Meningkatnya Tata Kelola Aset;
26. Pengarusutamaan Gender;
27. Kepatuhan Pelaporan P3DN;
28. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani;
31. Meningkatnya Inovasi Daerah;
32. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
33. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
34. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape;
35. Meningkatnya kepuasan Masyarakat;
36. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
37. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM	Tingkat	85	88,06	103,60%
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	222	88,80%
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100,00%
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100,00%
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100,00%
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%

11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100,00%
13	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100,00%
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100	100,00%
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100,00%
16	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100,00%
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100,00%
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70%	71%	101,43%
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100,00%
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100,00%
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100	100	100,00%
26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100,00%

28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	100	100	100,00%
29	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,1135	88,96%
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30%
31	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	63	60,12	95,43%
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,20%
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,9	8,9	100,00%
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau (60 -70)	94,46	157,43%
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100,00%
36	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100,00%
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00%
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja						101,13%

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 sebesar 101,13%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
1.5 Uraian Singkat Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	40
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Perbaikan Kedepan	42
LAMPIRAN	
1. Rencana Aksi Tahun 2023	
2. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Permasalahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	4
1.2 Keadaan Pegawai BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara per 31 Desember 2024	8
2.1 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2023 dan Target Tahun 2024	18
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	21
3.3 Hasil Survei Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM.....	25
3.4 Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat.....	28
3.5 Realisasi Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2018-2024	28
3.6 Daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti...	29
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	32
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	34
3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat	34
3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.11 Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	36
3.12 Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2024	37
3.13 Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis	39
3.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	40

3.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2023) ...	40
------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	7
2 Komposisi ASN berdasarkan status kepegawaian	9
3 Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin.....	10
4 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2019 s/d Tahun 2024.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1). Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2). Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3). Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4). Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Permasalahan pelayanan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Permasalahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara	Belum optimalnya ASN yang menyampaikan SKP ke BKN melalui E-Kinerja	ASN belum sepenuhnya memahami Aplikasi E-Kinerja yang terintegrasi dengan BKN Pusat
			Pajabat Pimpinan Tinggi belum sepenuhnya memahami Indikator Kinerja Utama dalam Renstra
			Pejabat Pimpinan Tinggi belum sepenuhnya memahami Pembagian Peran dan Hasil Kepada Para Pejabat Administrator
			Pejabat Administrator belum sepenuhnya memahami Pembagian Peran dan Hasil Kepada Para Pejabat Pengawas
			Pejabat Pengawas belum sepenuhnya memahami Pembagian Peran dan Hasil Kepada Para Pegawai dibawahnya
			Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara obyektif
			Data dukung atau eviden yang di aploud belum sepenuhnya relevan dengan proses bisnis capaian target kinerja dalam SKP
		Belum optimalnya Penyediaan data Tingkat kedisiplinan ASN di Perangkat Daerah	Masih ada perangkat daerah yang belum menyampaikan daftar rekap absensi
			Belum semua ASN memahami peraturan perundangan yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai
			Pengelolaan Manajemen Kepegawaian di Perangkat Daerah belum maksimal

			Komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam melaporkan pelanggaran disiplin di tempat kerja masih rendah
		Belum Optimalnya PNS Mendapatkan Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya dari Kemendagri	Belum semua PNS memahami Persyaratan untuk mendapatkan Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya dari Kemendagri
			Sub bagaian kepegawaian perangkat daerah belum sepenuhnya menyampaikan kepada PNS yang sudah memenuhi persyaratan untuk di usulkan mendapatkan Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya dari Kemendagri kepada BKPSDM
			Banyaknya berkas usulan penerbitan Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya yang belum diproses oleh Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden
		Belum optimalnya data dan informasi kepegawaian	SIMPEG belum secara konsisten diupdate oleh Perangkat Daerah dan belum terintegrasi dengan SAPK
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	Penyelesaian layanan dokumen kepegawaian yang belum sesuai SOP
			Belum sinkronnya data PNS dengan data SIASN
			Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan administrasi secara online (masih terkendala pada computer yang belum memadai dengan Tingkat digitalisasi layanan terkini)
			Kompetensi pegawai BKPSDM yang perlu ditingkatkan.
			Belum tersedianya peraturan atau kebijakan pola karier PNS sebagai bentuk kejelasan dalam berkarier.
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS	Program pengembangan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisa kebutuhan pengembangan kompetensi
			Belum disusunnya kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan sebagai panduan pengembangan kompetensi
			Pemilihan peserta pengembangan kompetensi, belum dibuatkan standar dan kriteria calon peserta pengembangan kompetensi
			Belum semua PNS mengikuti program pengembangan kompetensi dengan jumlah minimum 20 JP pertahun

1.4.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

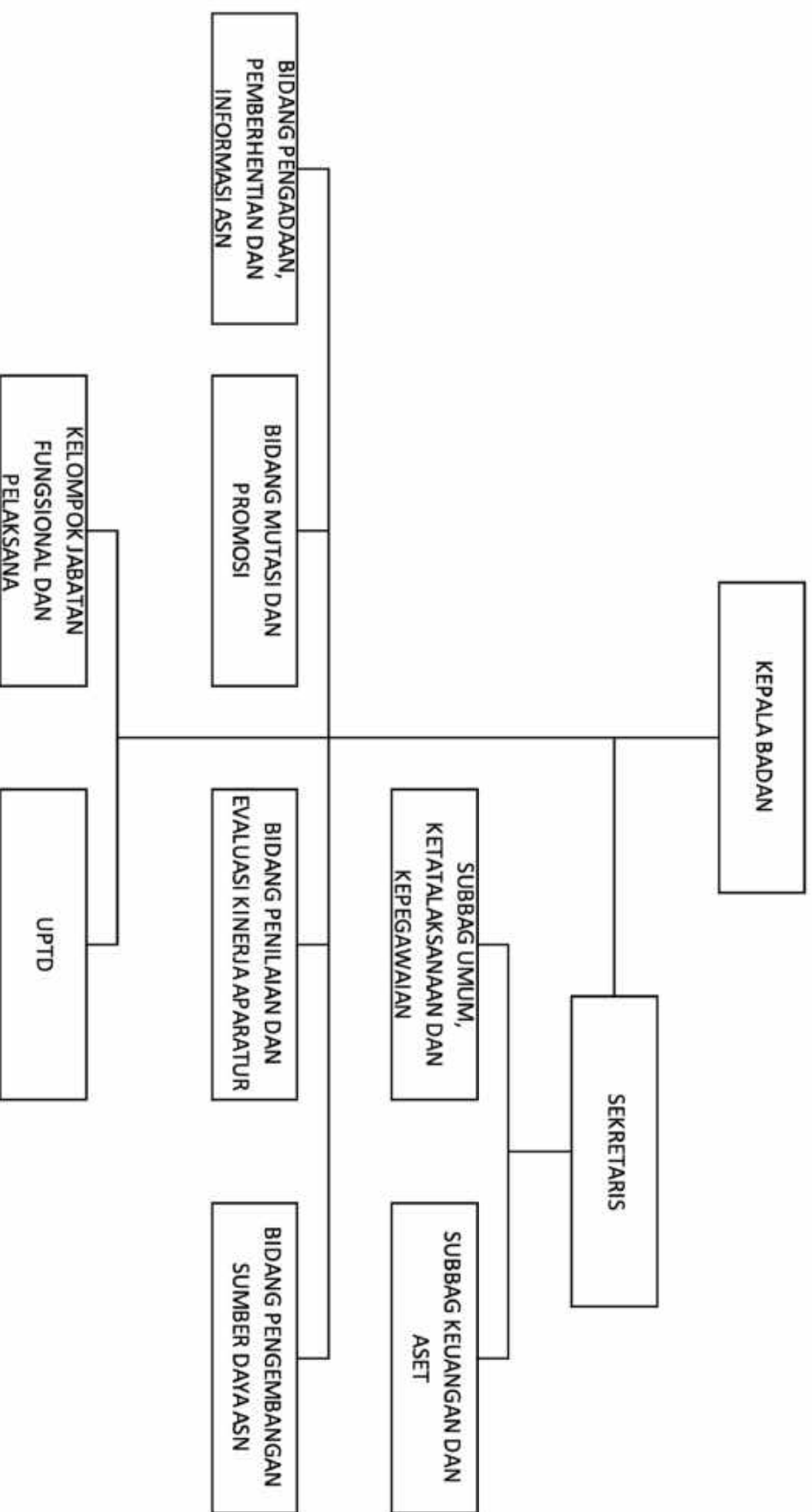
- a. Belum optimalnya ASN yang menyampaikan SKP ke BKN melalui E-Kinerja;
- b. Belum optimalnya Penyediaan data Tingkat kedisiplinan ASN di Perangkat Daerah;
- c. Belum Optimalnya PNS Mendapatkan Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya dari Kemendagri;
- d. Belum maksimalnya pengelolaan informasi kepegawaian;
- e. Belum tersedianya Dokumen analisis kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun untuk menentukan formasi dan penataan pegawai pada masing masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar pemenuhan kebutuhan ASN dalam rangka layanan administrasi kepegawaian seperti (mutasi masuk, mutasi antar perangkat Daerah, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional)
- f. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang peraturan atau kebijakan pola karier PNS sebagai panduan /kejelasan jenjang karir ASN;
- g. Peningkatan kompetensi pegawai pada Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM dalam hal memberikan pelayanan prima; dan
- h. Sarana dan prasarana Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM yang belum representative seperti Personal Computer/laptop dan alat pemindai/Scan dalam mendukung beberapa aplikasi pelayanan kepegawaian yang memerlukan Tingkat digitalisasi layanan terbaru;
- i. Optimalisasi Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan peningkatan kompetensi ASN;
- j. Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN;
- k. Kesenjangan Kompetensi;
- l. Peningkatan kompetensi pegawai BKPSDM; dan
- m. Sarana dan prasarana BKPSDM yang belum representatif.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) pejabat fungsional, 58 (lima puluh delapan) Pelaksana dan 32 THL sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2023

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Data mengenai keadaan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
KEADAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PER DESEMBER 2021

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
	PNS	
1.	S3	1 Orang
2.	S2	4 Orang
3.	S1	42 Orang
4.	D-IV	3 Orang
5.	D-III	1 Orang
6.	SLTA	24 Orang
7.	SLTP	0 Orang
	Sub Total	75 Orang
	THL	
8.	S1	22 Orang
9.	SLTA	9 Orang
10.	SLTP	1 Orang
	Sub Total	32 Orang
	Total	107 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

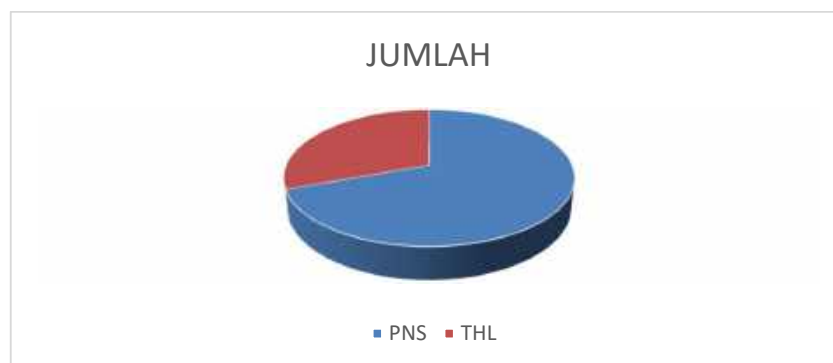
No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 Orang
2.	Pembina (IV/a)	1 Orang
3.	Penata Tingkat I (III/d)	16 Orang
4.	Penata (III/c)	8 Orang

5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15	Orang
6.	Penata Muda (III/a)	12	Orang
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	16	Orang
8.	Pengatur (II/c)	4	Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	Orang
10.	Pengatur Muda (II/a)	1	Orang
	Sub Total	75	Orang
11	THL	32	Orang
	Total	107	Orang

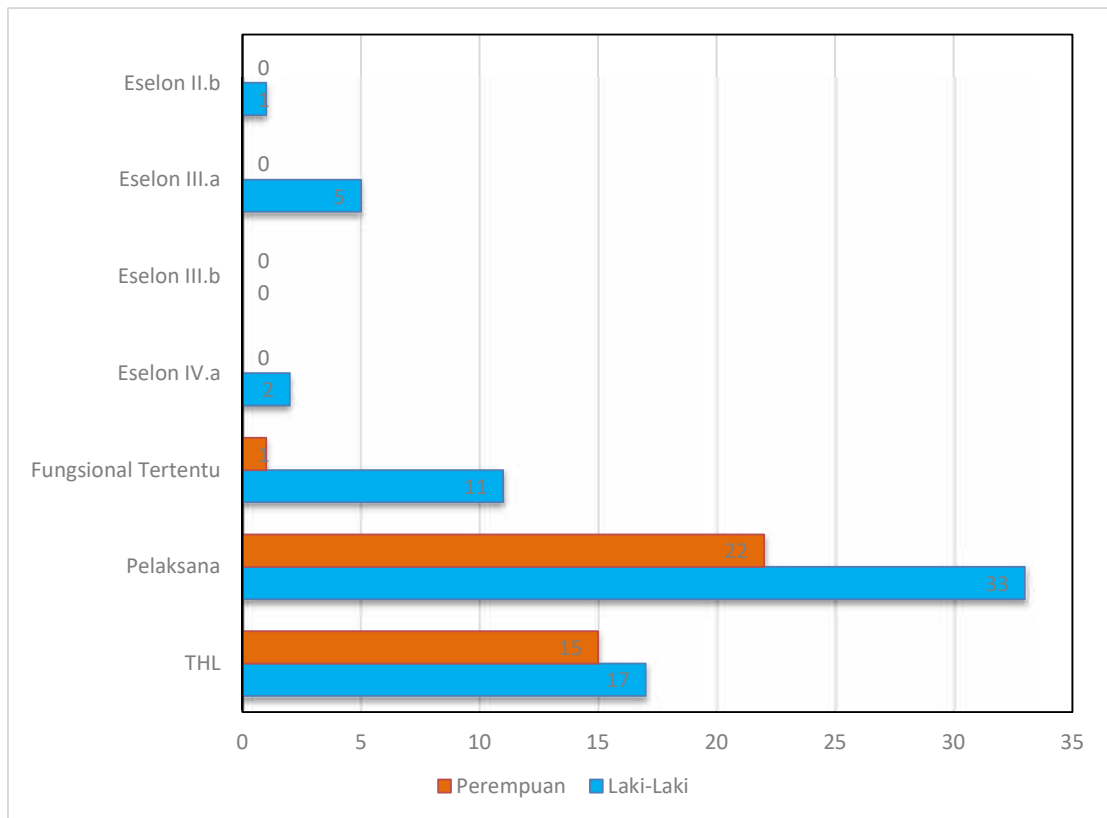
3. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	
	- Eselon II.b	1 Orang
	- Eselon III.a	5 Orang
	- Eselon III.b	0 Orang
	- Eselon IV.a	2 Orang
2	Fungsional Tertentu	12 Orang
3	Pelaksana	55 Orang
4	THL	32 Orang
	Total	107 Orang

Gambar 2 Komposisi ASN berdasarkan status kepegawaian



Gambar 3 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Misi ke-1 (satu) yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM; dan
2. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penguatan manajemen kinerja BKPSDM	1.1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BKPSDM 1.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 1.3. Peningkatan kapasitas SDM BKPSDM 1.4. Peningkatan kualitas tata kelola arsip BKPSDM 1.5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap 1.6. Peningkatan kualitas layanan dokumen surat menyurat, jasa internet dan THL 1.7. Peningkatan kualitas analisis kebutuhan pegawai, data dan informasi kepegawaian 1.8. Pelaksanaan promosi PNS dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi dan pengembangan karier 1.9. Peningkatan kapasitas ASN dan fasilitasi tugas belajar/ijin belajar 1.10. Pelaksanaan penilaian
2	Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan	2.1. Pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Tingkat	85	Survey kepuasan ASN terhadap layanan BKPSDM
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	Hasil Evaluasi KASN
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	Laporan Bagian Organisasi
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	Laporan Bagian Organisasi

4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	BKPSDM
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	Laporan Bagian PBJ
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	Laporan BAPPEDA
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	Laporan Penyampaian Usulan RKBMD ke BPKAD
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	Laporan Penyampaian Usulan SHS ke BPKAD
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	Laporan Penyampaian LKJIP ke Inspektorat
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	Laporan Penyampaian IKK LPPD ke Bagian Pemerintahan
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	Laporan Keyangan Tahunan ke BPKAD

12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	Laporan hasil Survei SKM dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) per Semester
13	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	Laporan Inspektorat
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	Laporan Inspektorat
16	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	BKPSDM
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	Laporan BPKAD (siPD)
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	Laporan Inspektorat
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	Laporan Inspektorat
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	Hasil Evaluasi
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	Laporan Inspektorat
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	Laporan BRIDA
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100	

26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	Bagian PBJ
29	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,5	Bagian Pemerintahan
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	Laporan Inspektorat
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	63	KemenPAN RB
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	Surat Keputusan KEMENDAGRI
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,9	Survey kepuasan ASN terhadap layanan BKPSDM
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Ombudsman
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	
36	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	Survey kepuasan ASN terhadap layanan BKPSDM
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal	Target 2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM	Tingkat	76,62	85	
2	Indeks Sistem Merit	Nilai	n/a	250	
3	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	n/a	100	
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	n/a	100	
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	n/a	100	
6	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	n/a	100	
7	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	n/a	100	
8	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	n/a	100	
9	Tingkat Keteepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	n/a	100	
10	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	n/a	100	
11	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	n/a	100	
12	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	n/a	100	
13	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	n/a	100	
14	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	n/a	100	
15	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	n/a	100	
16	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	n/a	100	
17	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	n/a	100	
18	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	n/a	100	

1	2	3	4	5	6
19	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	n/a	70	
20	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	n/a	100	
21	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
22	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
24	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
25	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	n/a	100	
26	Pengamanan Aset Tanah	Persen	n/a	100	
27	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	
28	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	n/a	100	
29	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	n/a	100	
30	Nilai LPPD	Nilai	n/a	3,5	
31	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	n/a	73	
32	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	n/a	63	
33	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	49,57	
34	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	n/a	8,95	
35	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	n/a	Zona Hijau (60 - 70)	
36	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	n/a	100	
37	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	n/a	100	
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	n/a	100	
39	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 sebesar 102,10%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **“SANGAT TINGGI”**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM	Tingkat	85	88,06	103,60%	Sangat Baik
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	222	88,80%	Tinggi

Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Keteepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik

Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70%	71%	101,43%	Sedang
Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik

	pelaksana pada Perangkat Daerah					
Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,1135	88,96%	Sangat Baik
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30%	Sangat Baik
Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	63	60,12	95,43%	Sangat Baik
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,20%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,9	8,9	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau (60 -70)	94,46	157,43%	Sangat Baik
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					101,13%	Sangat Baik

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1). Capaian Indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

Target kinerja indikator “**Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM**” sebesar 85,00 dengan realisasi 88,06 atau capaian kinerja sebesar 103,60% berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Nilai IKM/Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan

survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$N = \text{Bobot Nilai Per Unsur}$

Untuk memperoleh nilai SKM unit unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dapat dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 diperoleh dari survei terhadap 821 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Prosedur Pelayanan	3,47
U2	Persyaratan Pelayanan	3,41
U3	Waktu Pelayanan	3,34
U4	Biaya/Tarif	3,93
U5	Produk Layanan	3,39

U6	Kompetensi Pelaksana	3,42
U7	Perilaku Pelaksana	3,47
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,86
U9	Sarana dan Prasarana	3,42
	Nilai Rata-rata	3,52
	IKM Unit Pelayanan	88,06

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.4

Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 88,06 menunjukkan nilai interval pada posisi 3,0644 – 3,532. Sesuai dengan tabel di atas maka Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah “B” atau berpredikat “Baik”.

Target kinerja Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM sudah tercapai, meskipun demikian masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.
 - c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan oleh :
- a. Database ASN belum terintegrasi dengan sistem pelayanan.
 - b. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih lemah.
3. Prosedur Pelayanan yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain disebabkan :
- a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.

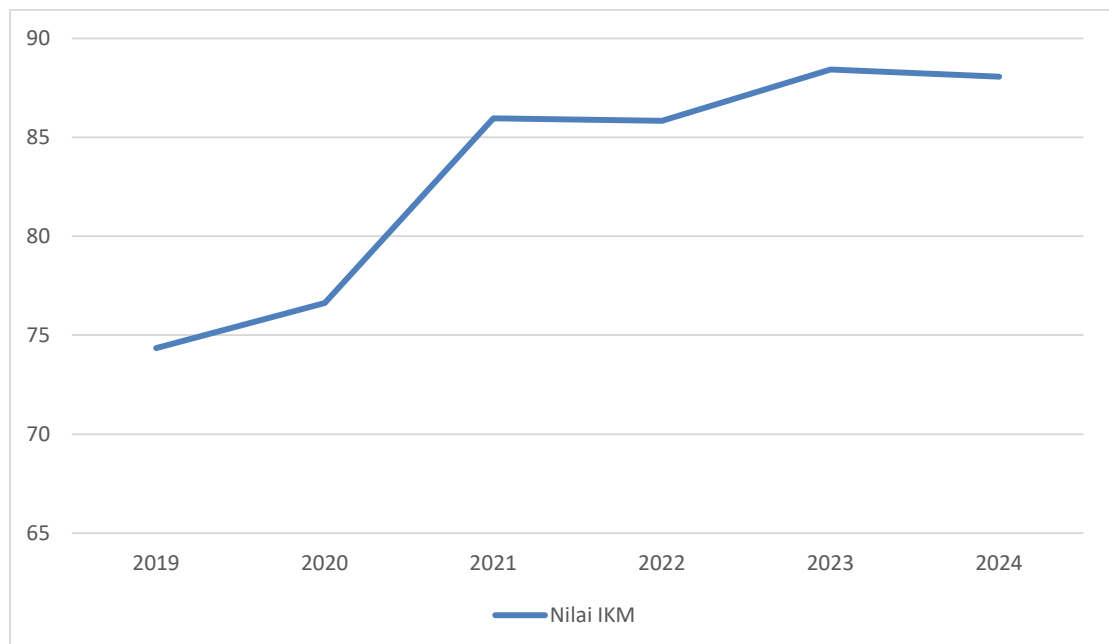
Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat Standar Operasi Prosedur yang berisi alur kerja dan waktu penyelesaian pekerjaan
2. Menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan kepada stakeholder
3. Menggunakan API dalam interoperabilitas data dengan aplikasi SIMPEG/SIASN
4. Menampilkan informasi terkait produk layanan lebih jelas dan meluas dengan dipajang di ruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media massa.
5. Mempermudah ASN dalam mengakses pelayanan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
7. Menyederhanakan persyaratan pelayanan
8. Menyesuaikan proses bisnis layanan

Tabel 3.5
Realisasi Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM
Tahun 2018-2024

No	Sasaran	Satuan	Realisasi					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Nilai	74,35	76,62	85,96	85,83	88,43	88,06
Kenaikan/Penurunan				2,27	9,34	-0,13	2,6	-0,37

Gambar 4 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM Tahun 2019 s/d Tahun 2024



2). Capaian Indikator Indeks Sistem Merit

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator “**Indeks Sistem Merit**” sebesar 250. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada indikator tersebut mencapai 222. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 88,80% dari target

yang ditetapkan. Meskipun capainnya di bawah target, evaluasi ini memberikan gambaran tentang pencapaian positif seiring upaya untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit, serta memberikan pandangan untuk pengembangan dan perbaikan di masa mendatang.

Faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja ini antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman tentang Sistem Merit;
2. Kurangnya upaya perbaikan dan peningkatan implementasi sistem merit;
3. Sistem Merit masih dianggap pekerjaan tambahan; dan
4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain pengampu Indeks Sistem Merit

3). Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024

Target kinerja indikator **“Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024”** tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen seluruh wajib LHKPN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Januari 2024
- b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan selama tahun 2023.

4). Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN/SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2024

Target kinerja indikator **“Tingkat Kepatuhan LHKASN /SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2024”** tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen seluruh wajib SPT Tahunan di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Januari 2024; dan
- b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan selama tahun 2023.

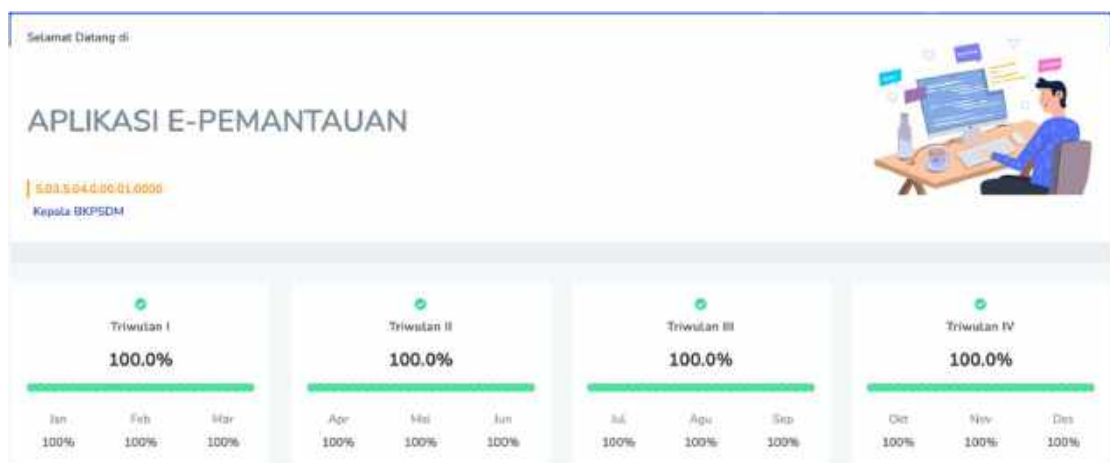
5). Capaian Indikator Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP

Target kinerja Indikator **“Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP”** tahun 2024 tercapai 100%, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten

Kartanegara nomor B-2621/BPBJ/065.11/11/2023 tanggal 6 November 2023. BKPSDM sudah menyelesaikan Input RUP sebelum batas akhir Input RUP sesuai surat Edaran.

6). Capaian Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau”

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau” BKPSDM tahun 2024 sebesar 100% dan selesai 100% sesuai dengan tangkap Layar aplikasi e-Pantau <https://e-pantau.kukarkab.go.id/2024/> sebagaimana tampak pada hasil Capture Screen berikut:



7). Capaian indikator Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD

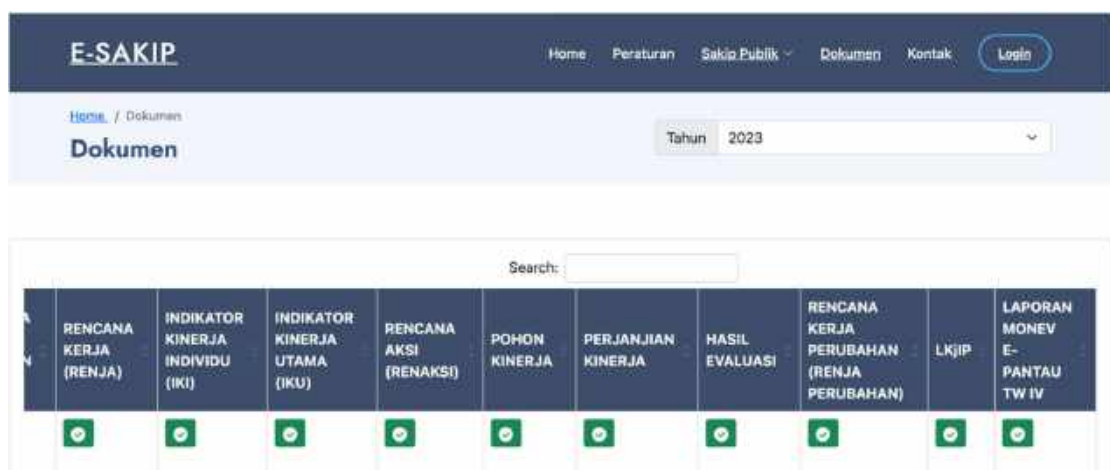
Target kinerja Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD” tahun 2024 sebesar 100% dan selesai 100%, hal ini wajib diusulkan oleh Perangkat Daerah mengingat usulan RKBMD menjadi syarat dalam penyusunan RKA kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan barang Milik Daerah.

8). Capaian indikator Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)

Tahun 2024, sesuai dengan surat Edaran Sekda Nomor B-229/BPKAD/BAS.1/ 065.11/02/2024 tentang Tata cara Pengusulan/Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, BKPSDM telah mengusulkan Standard Harga Satuan pada bulan Pebruari dan Mei tahun 2024, masing masing dengan nomor surat B-63/UMLAK/900.1/02/2024 dan P-146/SET.II/900.1/ 05/2024. Dengan demikian Tagert kinerja indikator “Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)” tercapai 100%.

9). Capaian indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP

Pada tahun 2024, BKPSDM telah menyelesaikan penyusunan laporan LKjIP pada bulan Pebruari 2024, dengan demikian, target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP” tercapai 100%, hal ini dapat dibuktikan dengan tangkap layar aplikasi <https://sakup.kukarkab.go.id/detaildokumen?tahun=2023> seperti tampak pada gambar berikut:



10). Capaian indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD” sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Skor nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 3,42 atau status Tinggi.

11). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah” tahun 2024 sebesar 100% dan selesai tepat waktu 100%

12). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah” sebesar 100% dan terlaksana 100% yang dapat dibuktikan dengan laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 88.06 sebagaimana tertera pada **Tabel 3.3 “Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM”** diatas.

13). Capaian Indikator Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Untuk tahun 2024, Target kinerja Indikator “Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik” pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai kartanegara dan Perangkat Daerah diundang secara Daring dan atau Datang langsung untuk hadir disetiap kali ada kegiatan “**Forum Konsultasi Publik**”. Dengan demikian Target kinerja Indikator “**Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik**” dapat tercapai sebesar 100%.

14). Capaian Indikator Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terdapat temuan BPK/Inspektorat. Dengan demikian capaian indikator “**Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti**” tahun 2024 sebesar 100,00% dan tercapai sebesar 100,00%

Tabel 3.6
Daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket
1	-	-	-	-

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- Komitmen untuk menyelesaikan temuan administrasi BPK/Inspektorat; dan
- Koordinasi dengan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

15). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP

Target kinerja Indikator **“Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP”** sebesar 100% dan selesai tepat waktu 100% dengan skor penilaian sebesar 4,386 atau berada pada tingkat **“Terkelola dan Terukur”**.

16). Capaian Indikator Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK

Target kinerja Indikator **“Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK”** sebesar 100% dan telah diterapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil Survei dan Evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK 70.5%, masuk dalam Kategori **“Cukup Sehat”** berada setingkat dibawah kategori **“Sehat”** dan berada diatas nilai Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional 68.1%.

17). Capaian Indikator Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana

Target kinerja Indikator **“Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana”** sebesar 100% dan terlaksanan sebesar 100% yang dapat dibuktikan dengan Lampiran **“Perjanjian Kinerja dari Kepala Badan hingga Pelaksana”**.

18). Capaian Indikator Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan.

Target kinerja Indikator **“Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan”** sebesar 70%. Untuk capaian target bulanan, BKPSDM tidak dapat menjaga konsistensi capaian serapan sebesar 70%, mengingat anggaran kegiatan di BKPSDM lebih banyak di kegiatan pengembangan Kompetensi, yang mana jadwal kegiatan tersebut sangat bergantung pada Ketersediaan Jadwal dari Pihak Ketiga atau Instansi Vertikal. Namun jika diambil nilai rata rata, Capaian target kinerja indikator **“Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan”** sebesar 71%, berada diatas target Bulanan.

19). Capaian Indikator Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Target kinerja **“Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah”** tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan Register Risiko sesuai jadwal yang ditetapkan.

20). Capaian Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target kinerja Indikator “**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**” sebesar 100% dan selesai tepat waktu 100% dengan skor penilaian sebesar 4,386 atau berada pada tingkat “**Tekelola dan Terukur**”.

21). Capaian Indikator Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Target kinerja indikator “**Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah**” tahun 2024 sebesar 100% dan capaian Realisasi sebesar 100%. Berdasarkan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 Nomor B-2/P3A.DIARPUS/ 000.5.15.1/12/2024, BKPSDM mendapat nilai 82,34, masuk dalam kategori A atau Memuaskan. Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen layanan kepegawaian;
- b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen layanan kepegawaian; dan
- c. Dukungan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara dalam memberikan bimbingan penyusunan Pengeloan Arsip.

22). Capaian Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja Indikator “**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%, hal ini sesuai dengan laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan nomor surat **B-331/ITDA/IP.II/700.1/11/2024** tanggal 18 November 2024 dengan nilai hasil Evaluasi **74,62** dengan predikat “**BB**” atau “**SANGAT BAIK**”

23). Capaian Indikator Peningkatan Prestasi Inovasi

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator **“Peningkatan Prestasi Inovasi”** sebesar **49,57**. Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2024, capain kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **58,59**. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 118,20% dari target yang ditetapkan.

24). Capaian Indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Pada tahun 2024, BKPSDM menerima satu pengaduan dari ASN yang sudah selesai menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan atas kasus Pidana Narkotika. Terhadap Aduan tersebut, BKPSDM telah menindaklanjuti dengan bersurat ke BKN dengan surat Pengantar nomor B-074/BKPSDM/PPI/800.1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, Target kinerja Indikator **“Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor”** dari BKPSDM telah terrealisasi sebesar 100%.

Sampai saat ini, SK Pengaktifan kembali ASN yang bersangkutan dalam proses dan masih menunggu Peraturan Teknis (PERTEK) dari BKN.

25). Capaian Indikator Meningkatnya Pengamanan Aset

Target kinerja Indikator **“Meningkatnya Pengamanan Aset”** sebesar 100% dan terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya Keputusan Bupti Nomor 245/SK-BUP/HK/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

26). Capaian Indikator Meningkatnya Tata Kelola Aset

Target kinerja Indikator **“Meningkatnya Tata Kelola Aset”** sebesar 100% dan terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya laporan yang diantaranya adalah Laporan Inventarisasi Aset berdasarkan Jenis Aset dan adanya Laporan Kartu Inventasi Barang Ruangan (KIB Ruangan Yang dibuat oleh Pengelola Aset di BKPSDM sebagai bahan laporan ke Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disetiap tahunnya.

27). Capaian Indikator Pengarusutamaan Gender

Target kinerja Indikator **“Pengarusutamaan Gender”** sebesar 100% dan terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya kegiatan Assesment

Center dengan pagu anggaran sebesar 1.950.000.000 (Satu Miliar sembilan Ratus Limapuluh Juta Rupiah) di bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, BKPSDM.

28). Capaian Indikator Kepatuhan Pelaporan P3DN

Target kinerja Indikator **“Kepatuhan Pelaporan P3DN”** sebesar 100% dan terlaksana sebesar 99,88%, dengan realisasi PDN terhadap Komitmen sebesar 73,48%, hal ini sesuai dengan List yang dikeluarkan oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

29). Capaian Indikator Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target kinerja Indikator **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** sebesar 3,5 dan tercapai sebesar 3,1135, hal ini sesuai dengan Keputusan Kemnterian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 TAHUN 2024 tanggal 21 Desember 2023 dengan nilai hasil Evaluasi sebesar 3,1135 dengan status **“Sedang”**.

30). Capaian Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target kinerja Indikator **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”** sebesar 73 dan tercapai sebesar 65,92, hal ini sesuai dengan surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan nomor surat B/417/AA.05/2024 tanggal 3 September tahun 2024 dengan nilai hasil Evaluasi 65,92 dengan predikat **“B”**.

Capain tersebut memang masih dibawah target, namun dalam Kriteria Penilain, capain tersebut masuk dalam Kategori **“Tinggi”**.

31). Capaian Indikator Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

Target kinerja Indikator **“Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani”** sebesar 63 dan tercapai sebesar 65,92, hal ini sesuai dengan surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan nomor surat B/417/AA.05/2024 tanggal 3 September tahun 2024 dengan nilai hasil Evaluasi 65,92 dengan predikat **“B”**.

Capain tersebut memang masih dibawah target, namun dalam Kriteria Penilaian, capain tersebut masuk dalam Kategori “Tinggi”.

32). Capaian Indikator Meningkatnya Inovasi Daerah

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator **“Peningkatan Prestasi Inovasi”** sebesar 49,57. Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2024, capain kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 58,59. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 118,20% dari target yang ditetapkan.

33). Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik

Target kinerja Indikator **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik”** sebesar 8,95 dan tercapai sebesar 8,95. Hal ini dapat dari Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 84,54 menunjukkan nilai interval pada posisi 3,0644 – 3,532. Sesuai dengan Tabel 3.4 **“Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat”** di atas.

34). Capaian Indikator Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Target kinerja Indikator **“Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”** berada di zona Hijau (60 - 70) dan nilai capaian sebesar **94,46** sesuai Hasil Penilaian OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor R/3315/PC.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024. Capaian tersebut diatas target dengan persentase capaian sebesar **157,43%**, berada dalam kategori **A (Kualitas Tertinggi)**.

35). Capaian Indikator Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape

Target kinerja **“Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran”** tahun 2024 sebesar 100 point. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri, realisasi kinerja indikator tersebut mencapai 100,00%. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. Dukungan dan komitmen dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

36). Capaian Indikator Meningkatnya kepuasan Masyarakat

Target kinerja Indikator “**Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah**” sebesar 100% dan terlaksana 100% yang dapat dibuktikan dengan laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai 88.06 sebagaimana tertera pada **Tabel 3.3** “Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM” diatas.

37). Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja Indikator “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” sebesar 100% dan tercapai 100%. Berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL – KLHK) tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara, memperoleh 73,59 berada dalam kategori BAIK, sesuai dengan surat Penyampaian Hasil IKLH nomor S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.01/B/12/2024, dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL – KLHK).

38). Capaian Indikator Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja Indikator “**Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah**” sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Dengan Nilai laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar 74,62 dengan predikat “BB” atau “**SANGAT BAIK**” dapat menggambarkan bahwa Indikator “**Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah**” tercapai

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 101.69 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 97.07%. Terjadi kenaikan kinerja sebesar 4,62%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	82	84.54	103.10%	85	88.06	103.60%	Meningkat
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Indeks Sistem Merit	Nilai	250	215	86.00%	250	222	86.60%	Meningkat
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3	2	66.67%	0	0	100%	Menurun
Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen							
Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persentase ketepatan waktu & kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2024)	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap

Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predika t	Baik (B) 60-70	77.4	129.00%	80	82, 34	102.93%	Meningkat
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00%	100	100	100%	Tetap
Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Tetap
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100	96.09	96.09%	100	100	100.00%	Meningkat
	Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100	89.63	89.63%	100	71	71.00%	Turun
Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerah	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100.00%	2	2	100.00%	Tetap
Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokum en	1	1	100.00%	1	1	100.00%	Tetap
Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim Budaya Kerja	Kegiata n	4	4	100.00%	1	1	100.00%	Tetap
Melaksanakan pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100	70.95	70.95%				Masih menunggu hasil penilaian di Inspektorat
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100.00%	100	100	100.00%	Tetap
Rata-rata Capaian Kinerja					97.07%			101.53%	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	90	84,54	88,06

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Negara

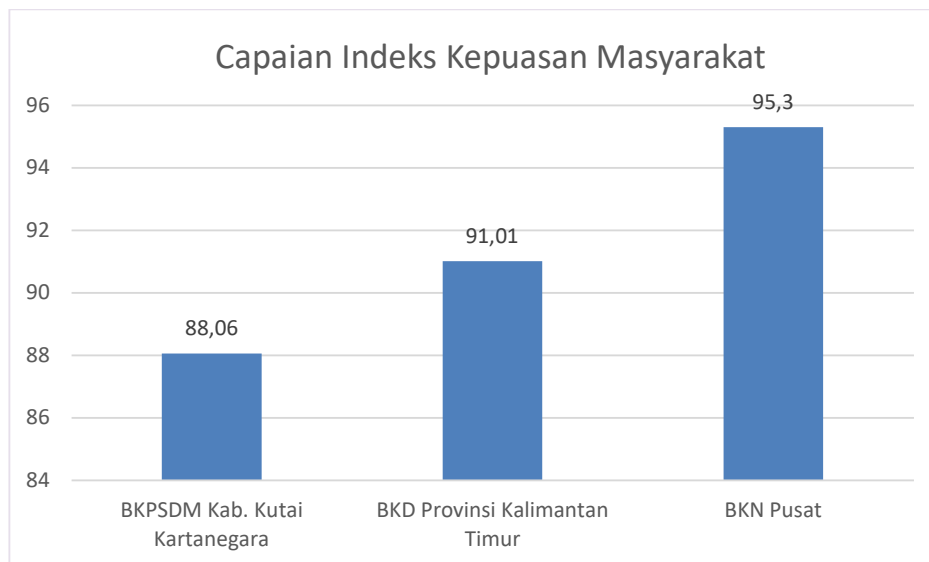
Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat

Instansi	Indikator Kineja	Realisasi Kinerja
BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	88.06
BKD Provinsi Kalimantan Timur	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	91,01
BKN Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan BKN	95,3

Perbandingan realisasi kinerja dalam tabel di atas dapat disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kedua instansi tersebut. Penting bagi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	88,06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,0		Tidak Efisien
			Program Kepegawaian Daerah	68,9		Tidak Efisien
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,8		Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mencapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa BKPSDM dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis selama tahun 2024 **“Tidak Efisien”**.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	74,62	85.77%

Target Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 87 dan realisasinya 74,62 atau capaian kinerja

sebesar 85,77%, target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a. Adanya perubahan cara/parameter Penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh OPD Turun;
- b. Kurangnya koordinasi antar bidang
- c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan pengembangan kompetensi bagi SDM aparatur di lingkungan BKPSDM melalui diklat, bimtek dan lain-lain terkait perencanaan;
 - b. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan 1 kali);
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan seperti Srikandi, Praktis (PResensi ASN KUKAR Terintegrasi dan Dinamis), SIASN, Simpeg, SIPD dan Simda BMD.
- 2) Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah
Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94%	100%	106,38%
Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	85 Nilai	86 Nilai	101,18%
Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi	85 Nilai	91 Nilai	107,06%
Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	85 Nilai	88 Nilai	103,53%
Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	85 Nilai	85 Nilai	100,00%
Rata Rata Capaian				103,63%

Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi rata-rata sebesar 103,63%. Target kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2024 tercapai. Faktor yang mendukung dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- a. Faktor Pendukung Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
 1. Adanya Pengadaan Formasi PPPK sebanyak 5.776 Formasi;
 2. Pemberhentian PNS sebanyak 488 PNS.
- b. Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah:
 1. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengembangan kompetensi nonklasikal;
 2. Kemudahan akses informasi terutama melalui media sosial;
 3. Kerjasama dengan lembaga pelatihan/mitra strategis.
- c. Faktor Pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi adalah Tersedianya aplikasi survei layanan kepuasan ASN pada bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Faktor pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah:
 1. Layanan Sistem Informasi Kepegawaian secara Online;
 2. Layanan Karis Karsu secara Online;
 3. Layanan Cuti secara Online;
 4. Layanan Tapera secara Online;
 5. Layanan Pensiun;
 6. Layanan Pengadaan ASN.
- e. Faktor pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan adalah Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebesar 26% dan realisasi 51% atau capaian kinerja sebesar 196,15%. Capaian kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 diatas target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Non Klasikal;
2. Cost Sharing dengan Perangkat Daerah;
3. Penggunaan Teknologi Informasi.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	76,42	85,77%	- Adanya perubahan cara/ parameter Penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh OPD Turun; - Kurangnya koordinasi antar bidang - Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual.
		Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94	100	106,38%	- Pengadaan Formasi PPPK sebanyak 5.776 Formasi; - Pemberhentian PNS sebanyak 488 PNS
			Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	85	86	101,18%	- Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengembangan kompetensi nonklasikal; - Kemudahan akses informasi terutama melalui media sosial; - Kerjasama dengan lembaga pelatihan/ mitra strategis
			Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi	85	91	107,06%	Tersedianya aplikasi survei layanan kepuasan ASN pada bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara
			Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	85	88i	103,53%	- Layanan Sistem Informasi Kepegawaian secara Online; - Layanan Karis Karsu secara Online; - Layanan Cuti secara Online; - Layanan Tapera secara Online; - Layanan Pensiun; - Layanan Pengadaan ASN
			Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	85	85i	100,00%	Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26	51	196,15%	- Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Non Klasikal; - Cost Sharing dengan Perangkat Daerah; - Penggunaan Teknologi Informasi

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **86,18%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	22.227.740.842,00	19.575.565.549,00	88,07%	2.652.175.293,00
		Program Kepegawaian Daerah	5.304.454.000,00	4.054.279.556,00	76,43%	1.250.174.444,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.914.000.000,00	2.609.038.640,00	89,53%	304.961.360,00
Total			30.446.194.842,00	26.238.883.745,00	86,18%	4.207.311.097,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 87,42%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.263.312.404,00	11.759.281.653,00	88,66%	1.504.030.751,00
		Program Kepegawaian Daerah	3.235.838.160,00	2.595.981.607,00	80,23%	639.856.553,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.200.701.700,00	1.992.446.226,00	90,54%	208.255.474,00
Total			18.699.852.264,00	16.347.709.486,00	87,42%	2.352.142.778,00

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 1,24%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 rata-rata sebesar 101,13% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM sebesar 103,60% (Sangat Tinggi);
2. Capaian Indeks Sistem Merit 88,80% (Tinggi)
3. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2025 sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
4. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025 sebesar 100,00% (Sangat Tinggi);
5. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun sebesar 100,00%;
6. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100,00%;
7. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100,00%;
8. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan sebesar 100,00%;
9. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya sebesar 100,00%;
10. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun sebesar 100,00%;
11. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun sebesar 100,00%;

12. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun sebesar 100,00%
13. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun sebesar 100,00%
14. Capaian kinerja indikator Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100,00%;
15. Capaian kinerja indikator Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir sebesar 100,00%;
16. Capaian kinerja indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun berjalan sebesar 100,00%;
17. Capaian kinerja indikator Internalisasi Core Values ASN Berakhlak sebesar 100,00%;
18. Capaian kinerja indikator Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan) sebesar 100,00%;
19. Capaian kinerja indikator Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 101,43%;
20. Capaian kinerja indikator Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan sebesar 100,00%;
21. Capaian kinerja indikator Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah sebesar 100,00%;
22. Capaian kinerja indikator Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah sebesar 100,00%;
23. Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,00%;
24. Capaian kinerja indikator Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100,00%;
25. Capaian kinerja indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100,00%;
26. Capaian kinerja indikator Pengamanan Aset Tanah sebesar 100,00%;
27. Capaian kinerja indikator Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Perangkat Daerah sebesar 100,00%;

28. Capaian kinerja indikator Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender sebesar 100,00%;
29. Capaian kinerja indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan sebesar 100,00%;
30. Capaian kinerja indikator Nilai LPPD sebesar 88,96%;
31. Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 90,30%;
32. Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Indeks Inovasi Daerah sebesar 118,20%;
33. Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah sebesar 100,00%;
34. Capaian kinerja indikator Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah sebesar 157,43%;
35. Capaian kinerja indikator Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau sebesar 100,00%;
36. Capaian kinerja indikator IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) sebesar 100,00%;
37. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,00%;
38. Capaian kinerja indikator Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100,00%.

Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 97,07% sedangkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 101,13% atau mengalami peningkatan sebesar 4,06%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rutin dan konsisten;
3. Optimalisasi kualitas manajemen ASN;

4. Optimalisasi dan validasi data untuk pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
5. Optimalisasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
6. Update data kualifikasi, pengembangan kompetensi dan kinerja pns melalui SIASN;
7. Meningkatkan sinergitas dengan BKD Provinsi, BKN regional dan BKN Pusat serta lembaga terkait;
8. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian;
9. Optimalisasi publikasi terkait standar operasional prosedur dan standar pelayanan; dan
10. Meningkatkan dan menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

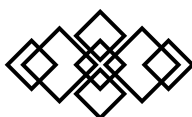
Tenggarong, 25 Februari 2025

KEPALA BKPSDM,

H. RAKHMADI, S.Sos

NIP. 19660107 200012 1 003

Rencana Aksi Perubahan BKPSDM Kab Kukar



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2024

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1	2	0		2	55.000.000	21.270.000,00	Aji Rifiq Miza, S.kom
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1	1	0		0	190.000.000	151.275.735,00	Aji Rifiq Miza, S.kom
									15 laporan									15	12.673.766.102,00	9.534.627.035,00	Sekretaris
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akurat	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akurat													
										Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Merenja Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Merenja Gaji dan Tunjangan ASN	1190 orang	234	240	240		160	12.428.766.102	9.333.796.963,00	Aji Rifiq Miza, S.kom
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	0	0		0	150.000.000	135.400.072,00	Aji Rifiq Miza, S.kom
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3	3	3		3	95.000.000	65.430.000,00	Aji Rifiq Miza, S.kom
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen									2	44.840.000,00	34.640.000,00	Sekretaris

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tetaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan 2 Laporan		0	0	1	1	44.940.000	34.640.000,00	Aji Rendi Muzia, S.Kom
						Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	2 Dokumen									2	46.356.840,00	Sekretaris
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Paketan Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	30 Orang	0	0	0	15	50.000.000	43.436.840,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Sosialisasi Perutusan Peundang-undangan	Tetaksananya Sosialisasi Perutusan Peundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perutusan Peundang- Undangan	50 Orang	0	0	0	25	50.000.000	2.920.000,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan									8	1.100.066.489,00	Sekretaris
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1	0	0	150.000.000	130.979.550,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	1	0	0	150.000.000	93.697.650,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	0	1	2	200.000.000	168.198.430,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Penyediaan Bahan/Material			2 Paket	1	0	0	0	150.000.000	122.940.000	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Facilities Kunjungan Tamu	Tetaksananya Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan 1 Laporan		0	0	0	0	125.000.000	18.326.946,00	Nuzulul Rahman, S.Sos
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tetaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan 1 Laporan		0	0	0	1	315.000.000	305.946.000,00	Erfanawati, S.Sos
										Pendataan Asip Dinamis pada SKPD	Tetaksananya Pendataan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peratustaan Asip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	0	0	422	28	100.000.000	81.580.000,00	Erfanawati, S.Sos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Telaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	0	0	2	557.335.000	178.417.913,00	Maya Indriani, S.Sos	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen									100%	131.054.400,00	Sekretaris	
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	4	0	11	330.000.000	131.054.400,00	Nuzulul Ratman, S.sos	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan						3	3	3	3	1.286.094.594,00	839.062.250,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	0	1	22.000.000	15.400.000,00	Fitriawati, S.Sos	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3	3	3	1	364.329.354	165.219.730,00	Fitriawati, S.Sos	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	0	1	167.350.000	114.620.000,00	Muzulul Ratman, S.sos	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3	3	3	3	682.415.240	543.622.520,00	Fitriawati, S.Sos	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit								15	325.000.000,00	131.054.400,00	Sekretaris
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelelana dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelelana dan dibayarkan Pakainya	15 Unit	0	4	0	11	325.000.000	131.054.400,00	Nuzulil Rahman, S.sos
						Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhnya kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen								100 Persen			Kabid Pengadaan, Pembentukan Dan Informasi
								Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	85 Nilai								86 Nilai			Kabid PSDA
								Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mulusi dan Promosi	85 Nilai								91 Nilai			Kabid Promosi dan Mulusi
								Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian	85 Nilai								88 Nilai			Kabid Pengadaan, Pembentukan Dan Informasi
								Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	85 Nilai								85 Nilai			Kabid PK
						Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan dan pembentukan ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberikan	1.262 ASN								6.264	1.591.550.000,00	824.886.515,00	Kepala Bidang Pengadaan, Pembentukan Dan Informasi Kepegawaian
										Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	0	0	1	0	75.000.000	40.129.000,00	Indah Wanyumarti, S.Psi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Tindaklanjutnya Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	1 Dokumen	0	0	0	1	450.000.000	182.615.109,00	Ulfah Fachrudin, S.Kom
										Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan ASN	Tindaklanjutnya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	0	0	0	1	100.000.000	50.169.000,00	Muhammad Rifani, S.Sos
										Fasilitasi lembaga profesi ASN	Tindaklanjutnya Lembaga Profesi ASN yang Disasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Disasilitasi	1 Lembaga	0	0	0	1	500.000.000	288.773.094,00	Murad Han Setiawan, SH
										Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	0	0	0	266.550.000	148.581.120,00	Aji Riqqi Mirza, S.Kom
										Pengelolaan data Kepegawaian	Teknologinya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	0	0	0	0	100.000.000	61.306.810,00	Aji Riqqi Mirza, S.Kom
										Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tindaklanjutnya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	0	0	0	0	100.000.000	53.312.382,00	Romy Fathasahani, S.Sos
						Mutasi dan Promosi ASN	Tindaklanjutnya mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan	2.353 ASN								3.706	625.000.000,00	625.000.000,00	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
										Pengelolaan Mutasi /ASN	Tindaklanjutnya Mutasi /ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	0	0	0	1	225.000.000	225.000.000,00	Haradi Rifani, S.Sos
										Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tindaklanjutnya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000	200.000.000,00	Agus Wiyono
										Pengelolaan promosi ASN	Tindaklanjutnya Pengelolaan Peningkatan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	0	0	0	1	200.000.000	200.000.000,00	Etha Purnanti, S.Sos

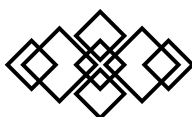
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Pengembangan kompetensi ASN	Tetapkasannya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikut pengembangan kompetensi	1.190 ASN		Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Dokumen	0	0	0	1	2.150.000.000	224.206.000.00	Mukhdan, SE
										Pengelolaan Assessment Center	Tetapdiolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	0	0	0	1	1.950.000.000	199.875.062.00	Amwar Wandi, S.Sos	
										Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Tetapkasannya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Dokumen	0	0	0	1	1.533.461.000	199.996.000.00	Sueman, SH	
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tetapkasannya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12.093 ASN									540.000.000.00	280.962.123.00	Kepala Bidang PK	
										Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tetapkasannya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	0	3	1	100.000.000	25.600.745.00	Dr. Achmad Jais, SE, M.Si	
										Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tetapkasannya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	0	0	1	125.000.000	106.263.500.00	Zulkifliyah, SE	
										Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tetapkasannya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	0	0	0	1	75.000.000	88.418.298.00	Bani Suwanto, SE	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26 Persen								51 Persen			Kabid PSDA	
						Pengembangan kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	784 ASN									6533	4.940.070.000,00	4.100.703.201,00	Kabid PSDA
										Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, intl, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penugak daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, intl, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penugak daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	784 Orang	305	1970	3993	265	4.940.070.000	4.100.703.201,00	Suheman, S.H	
						Sertifikasi, kembangan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kembangan, kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan manajerial dan fungsional										6	5.052.098.000,00	4.173.143.795,00	Kabid PSDA
																			</		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Penyelenggaraan Pengaturan Kependudukan bagi prajurit daerah, jabatan prajurit tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan penelitian	Penyelenggaraan Pengaturan Kependudukan bagi prajurit daerah, jabatan prajurit tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan penelitian	Penyelenggaraan Pengaturan Kependudukan bagi prajurit daerah, jabatan prajurit tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan penelitian	5.1.000000	0	0	1	4	4.522.094.000	3.987.088.703,00	Mahasiswa, SE

19030000 17 Oktober 2024
 Kepala Badan Koordinasi dan Penyelidikan Sumber Daya Manusia
 Kementerian Dalam Negeri
 NIP. 19601072000121003
 H. ARDIYANINGRAT, S.Sos

PK Perubahan 2024 BKPSDM Kab. Kukar





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RAKHMADI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), Jangka Menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai0nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada penggunaan Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, mengukur indeks kepuasan masyarakat dan indeks Pelayanan Publik;

8. Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi resiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
16. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target Perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan evaluasi Perjanjian kinerja kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab dan struktur organisasi secara berjenjang;
20. Terlaksananya "Gerakan Etam Mangaji (GEMA)" di Perangkat Daerah. Dengan indikator Laporan Pemetaan Kemampuan Mangaji ASN Perangkat Daerah dengan target 1 Laporan;
21. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Perangkat Daerah, dengan indikator Surat Keputusan Pembentukan UPZ Perangkat Daerah dengan target 1 Surat Keputusan;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhdap pelayanan BKPSDM	Tingkat	85
2.	Meningkatkan implementasi sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250
3.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada Aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun	Persen	100
6.	Terlaksananya kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7.	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat ketepatan waktu penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

8.	Terlaksananya Kepatuhan penyampaian usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
9.	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya ketepatan waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Per tanggal, 24 Januari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
13	Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100

15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
16	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Persen	100
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
23	Peningkatan Presentasi Inovasi	Presentasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100
25	Meningkatkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
26	Meningkatkatnya Tata Kelola Aset	Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana pada Perangkat Daerah	Persen	100

27	Pengausutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
29	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
30	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang aktif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai	64
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Predik t	Zona Hijau
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
36	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
38	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
39	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN	Persen	ASN
40	Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ	SK	OPD

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

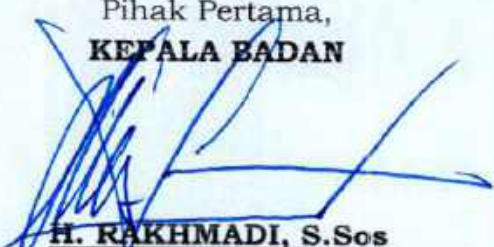
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGA
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.390.011.000	APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.992.168.000	APBD
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.767.035.696	APBD
JUMLAH ANGGARAN		37.149.214.696	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN


H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196601072000121003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROKIP, S.STP.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
6. Meningkatkan Realisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Mewujudkan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
9. Mewujudkan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;

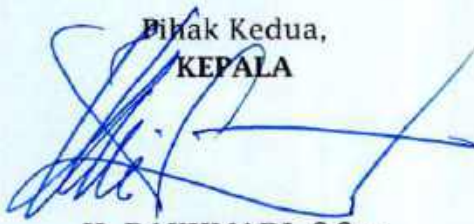
10. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
11. Mewujudkan Monitoring Center for Prevention KPK;
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA

H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

ROKIP. S.STP., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah BKPSDM	Laporan	1
2	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan SHS	Laporan	1
3	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
4	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
5	Kepatuhan Pelaporan P3DN Indikator	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
7	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
10	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100
11	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100

12	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
16	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
17	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	80 - 100
18	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
19	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Laporan	1
20	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Tersedia Pakta Integritas Pemakai Aset BMD sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana	Laporan	1
21	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko per Triwulan	Laporan	1
22	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Poin	50-100
23	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input E-Pantau dan telah di	Laporan	1

		verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan		
24	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Laporan	1
25	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan februari setiap tahun		
26	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Laporan	1
27	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	92
28	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Pemetaan Gema	Laporan	1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,-	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000,-	APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.428.766.102,-	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000,-	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.000.000,-	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.840.000,-	APBD
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,-	APBD
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,-	APBD

10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,-	APBD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,-	APBD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,-	APBD
13	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000,-	APBD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000,-	APBD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000,-	APBD
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,-	APBD
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	557.335.000,-	APBD
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.000.000,-	APBD
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,-	APBD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.329.354,-	APBD
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.350.000,-	APBD
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682.415.240,-	APBD
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		16.794.035.696,-	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA

H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

ROKIP. S.STP.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang yang saya pimpin;
2. Meningkatkan Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
4. Pemenuhan ketersediaan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
5. Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
6. Menyelesaikan penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan tata kelola arsip Perangkat Daerah;

8. Melaksanakan manajemen resiko program dan kegiatan di Bidang;
9. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
10. Meningkatkan Manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani;
11. Melaksanakan kepatuhan input e-Pantau untuk laporan kegiatan di Bidang;
12. Terealisasi output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
13. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
14. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
15. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197911262007011012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat pemenuhan Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	94
2.	Terlaksananya Pengadaan dan Pemberhentian ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah ASN Kabupaten Kutai Kartanegara yang diadakan dan diberhentikan	ASN	2.000
3.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian Seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Data dan informasi kepegawaian ASN yang lengkap serta diremajakan secara berkala	Laporan	1
4.	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase data dan informasi kepegawaian yang terupdate / terbaru	Persen	75
5.	Terlaksananya Layanan Fasilitasi Lembaga dan Profesi ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Layanan fasilitasi lembaga dan profesi ASN yang diselesaikan	Laporan	1
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase layanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN yang diselesaikan sesuai SOP	Persen	75
7.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

8.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
11	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
12	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
13	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
14	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Persentase capaian output kegiatan yang dicapai	Persen	100
15	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
16	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100
17	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Tingkat Kemampuan Mengaji ASN	Laporan	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	1.766.550.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.766.550.000	

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197911262007011012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHDAN, SE

Jabatan : Pj. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah;
3. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN;
5. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
7. Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
8. Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau;
9. Tersedianya Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN;
10. Tersusunnya Perjanjian Kinerja (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan);

11. Terealisasinya Anggaran Berdasarkan Ketersediaan SPD yang diterbitkan;
12. Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan;
13. Tersedianya kegiatan pengembangan kompetensi bagi Perempuan;
14. Terlaksananya Evaluasi terhadap Implementasi Core Values BerAKHLAK pada Perangkat Daerah.
15. Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos

PEMBINA TK.I (IV/B)

NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**Pj. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN**



MUKHDAN, SE

PENATA (III/C)

NIP. 19740707 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tingkat Kepuasan ASN Terhadap Layanan Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN	Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN	Nilai	85
2.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	50-60
3.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	ASN	9.800
4.	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persen	50,00
5.	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Persentase Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Persen	100
6.	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persen	100
7.	Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau	Persentase Verifikasi terhadap Input e-Pantau	Persen	100
8.	Tersedianya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang PSDA	Persentase jumlah data Indikator Kinerja Kunci bidang PSDA paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	90
9.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persentase ASN Bidang PSDA yang menyampaikan dokumen PK (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
10.	Terealisasinya Anggaran Berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan	Persentase realisasi anggaran berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan	Persen	70-90
11.	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah per Triwulan	Dokumen	4
12.	Tersedianya kegiatan pengembangan kompetensi bagi perempuan	Persentase jumlah partisipasi perempuan dalam mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	40
13.	Terlaksananya Evaluasi terhadap Implementasi Core Values BerAKHLAK pada Perangkat Daerah	Tersedianya Hasil Evaluasi Core Values BerAKHLAK pada Perangkat Daerah	Dokumen	1
14.	Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang PSDA	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN	Laporan	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	5.633.461.000,00	APBDP
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	4.940.070.000,00	APBD
3.	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	5.052.098.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		15.625.629.000,00	APBDP

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
Pj. KEPALA BIDANG PENEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN


MUKHDAN, SE
PENATA (III/C)
NIP. 19740707 199803 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUZULUL RAHMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROKIF, S.STP. M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
10. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
11. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
15. Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK
16. Kepatuhan Pelaporan P3DN
17. Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP
18. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau
19. Tersusunnya Laporan Absensi ASN BKPSDM
20. Tersusunnya Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM
21. Terlaksananya Pelayanan Administrasi cuti bagi ASN BKPSDM
22. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kenpa dan Pensiun bagi ASN BKPSDM
23. Terlaksananya Pelayanan Administrasi KGB bagi ASN BKPSDM
24. Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM
25. Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan BKPSDM
26. Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
27. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,



ROKIP, S.STP, M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



NUZULUL RAHMAN, S.Sos

PENATA (III/c)

NIP. 196812072000121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
3	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
4	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
5	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
6	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
7	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
8	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
9	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100
10	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1

	Kantor	Disediakan		
11	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
12	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
13	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.277
14	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
15	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
16	Terlaksananya penatausahaan arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	450
17	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	31
18	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15
19	Terlaksananya pengiriman surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
20	Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon dan jasa internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
21	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
22	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
23	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12

24	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
25.	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
26	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
27	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
28.	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	100
29	Tersusunnya Laporan Absensi ASN BKPSDM	Jumlah Rekapitulasi Absensi ASN BKPSDM	Dokumen	1
30	Tersusunnya Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM	Jumlah Laporan Kerja Harian ASN BKPSDM	Dokumen	1
31	Terlaksananya Pelayanan Administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan Pelayanan Administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
32	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kenpa dan Pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan Pelayanan Administrasi Kenpa dan Pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
33	Terlaksananya Pelayanan Administrasi KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan Pelayanan Administrasi KGB bagi ASN BKPSDM KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
34	Tersusunnya Laporan SKPASN BKPSDM	Jumlah Rekapitulasi SKP ASN BKPSDM	Dokumen	1
35	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan BKPSDM	Menyusun Daftar Urut Kepangkatan	Dokumen	1
36	Terlaksananya Pemetaan Gerakan Etam Mengaji di Subbagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Laporan Pemetaan kemampuan mengaji ASN	Laporan	1

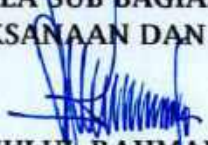
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	APBD
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	APBD
6	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	APBD
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000	APBD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	APBD
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000	APBD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	APBD
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000	APBD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.835.000	APBD
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.350.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682.415.240	APBD
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		2.785.600.240	

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


ROKIP, S.STP, M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 198604122004121001

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024
 Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


NUZULUL RAHMAN, S.Sos
 PENATA (III/c)
 NIP. 196812072000121003



PERJANJIAN KINERJA ERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIF, SE

Jabatan : Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ROKIP, S.STP., M.Si

Jabatan : SEKRETARSI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada penggunaan Barang Milik Daerah;
- 7 Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;

- 8 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 9 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 10 Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 11 Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun;
- 12 Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 13 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

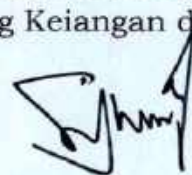
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



ROKIP, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,
Pj. Kasubag Keuangan dan Aset,



SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 196912312006041062

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Tersedianya Data Paket Pekerjaan pada Aplikasi e-RPJMD dan e-Pantau	Jumlah Paket Pekerjaan yang diinput pada aplikasi e-RPJMD dan e-Pantau	Paket	100
3	Tersedianya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4
4	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1120
6	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	13
7	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	600
8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
9	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100

15	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
17	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
18	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
19	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
21	Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN	Laporan	1

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000	APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.428.766.102	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.000.000	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.840.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		13.028.606.102	

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



ROKIP, S.STP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,
Pj. Kasubag Keiangan dan Aset,



SYARIF, SE

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 196912312006041062



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIFANI, S.Sos**

Jabatan : **Analisis Kepegawaian Madya**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Rakhmadi, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksananya layanan Administrasi Pensiun PNS
2. Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS
3. Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap
4. Terlaksananya Layanan Administrasi Pengadaan ASN
5. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja PNS
7. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan ASN
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

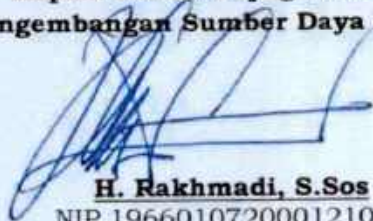
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

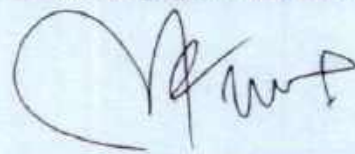
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,**



H. Rakhmadi, S.Sos
NIP.196601072000121003

Pihak Pertama,
Analisis Kepegawaian Ahli Muda



MUHAMMAD RIFANI, S.Sos
NIP.198009222007011013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya layanan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Dokumen usulan dan penetapan Layanan Administrasi Pensiun yang diselesaikan	Dokumen	200
2.	Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS	Jumlah dokumen penetapan Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS	Dokumen	3
3.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap	Jumlah Data yang dikelompokkan menjadi database kepegawaian	Data	500
4.	Terlaksananya Layanan Administrasi Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Pengadaan	Dokumen	1200
5.	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.	Jumlah data Sistem Informasi Kepegawaian yang di input dalam aplikasi kepegawaian sebagai peremajaan data	Data	1000
6.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja PNS	Jumlah dokumen Penilaian kinerja PNS yang dimonitoring /dievaluasi	Dokumen	200
7.	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan ASN	Jumlah dokumen Penyusunan data Kebutuhan dan Bezzeting ASN yang disusun	Dokumen	3
8.	Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pemberhentian	Dokumen	1
9.	Terlaksananya kepatuhan Input e-Pantau	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
10.	Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

SUB KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Keterangan

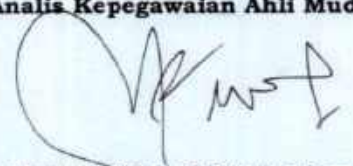
11.	Terlaksananya Percepatan realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
12.	Tersedianya Dokumen Manajemen resiko perangkat daerah	Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah Pertriwulan	Persen	100
13.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70%
14.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Jumlah pelatihan minimal 20 JP per Tahun yang diikuti	Sertifikat	20 JP
15.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,


H. Rakhmadi, S.Sos
 NIP.196601072000121003

Pihak Pertama,
Analisis Kepegawaian Ahli Muda


MUHAMMAD RIFANI, S.Sos
 NIP.198009222007011013

14. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



LUTHFI FACHRURI, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198212202010011024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyusunan data Kebutuhan ASN	Jumlah dokumen Penyusunan data Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	3
2.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1.200
3.	Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Jumlah penetapan proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Dokumen	10
4.	Terlaksananya Layanan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Dokumen usulan dan penetapan pensiun PNS yang diselesaikan	Dokumen	200
5.	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data Sistem Informasi Kepegawaian yang di input dalam aplikasi kepegawaian sebagai peremajaan data	Data	1.000
6.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap	Jumlah Data yang dikelompokkan menjadi database kepegawaian	Data	1.000
7.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
8.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

10	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
11	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
12	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Persentase capaian output kegiatan yang dicapai	Persen	100
13	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	450.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		450.000.000	

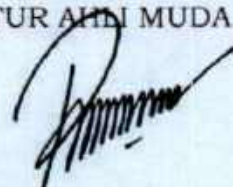
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHI MUDA



LUTHFI FACHRURI, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198212202010011024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH WAHYUNIARTI, S.Psi

Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan penyusunan data Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK;
3. Melaksanakan proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS;
4. Melaksanakan layanan administrasi pensiun PNS;
5. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
6. Menyediakan data dan informasi kepegawaian secara lengkap;
7. Melaksanakan kepatuhan input e-Pantau setiap awal bulan untuk laporan hasil kegiatan;
8. Melaksanakan kepatuhan penyampaian SKP paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun;
9. Menyediakan dokumen manajemen resiko Perangkat Daerah per Triwulan;
10. Merealisasikan output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
11. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
12. Melaksanakan serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan;
13. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

- tahun;
14. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;
 15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



INDAH WAHYUNIARTI, S.Psi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197801282011012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyusunan data Kebutuhan ASN	Jumlah dokumen Penyusunan data Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	3
2.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1.200
3.	Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Jumlah penetapan proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai PNS	Dokumen	10
4.	Terlaksananya Layanan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Dokumen usulan dan penetapan pensiun PNS yang diselesaikan	Dokumen	200
5.	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data Sistem Informasi Kepegawaian yang di input dalam aplikasi kepegawaian sebagai peremajaan data	Data	1.000
6.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap	Jumlah Data yang dikelompokkan menjadi database kepegawaian	Data	1.000
7.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
8.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

10	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
11	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
12	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Persentase capaian output kegiatan yang dicapai	Persen	100
13	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Penyusunan Rencana kebutuhan, Jumlah dan Jenis Jabatan Untuk Pengadaan ASN	75.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		75.000.000	

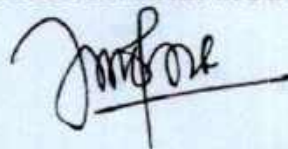
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



INDAH WAHYUNIARTI, S.Psi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197801282011012001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SOFIAN

Jabatan : PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan Peremajaan Data Kepegawaian ASN;
2. Melaksanakan Verifikasi Data Kepegawaian ASN;
3. Menyediakan Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Perangkat Daerah;
4. Melaksanakan kepatuhan penyampaian SKP paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun;
5. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

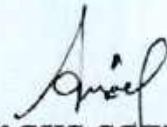
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 1

Pihak Pertama,
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR MAHIR



AGUS SOFIAN

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 197808102001121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Peremajaan Data Kepegawaian ASN	Jumlah Peremajaan Data Kepegawaian ASN yang terupdate	Data	1000
2.	Terlaksananya Verifikasi Data Kepegawaian ASN	Jumlah data kepegawaian ASN yang terverifikasi	Data	1000
3.	Tersedianya Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Perangkat Daerah	Jumlah rekapitulasi data yang di kelompokkan menjadi database kepegawaian	Rekapitulasi	7
4.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100
6.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
 ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
**PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA
 APARATUR MAHIR**



AGUS SOFIAN

Penata Muda Tk. I (III/b)
 NIP. 197808102001121003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Rifqi Mirza, S.Kom

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengikuti Seminar, lokakarya dibidang manajemen PNS Tingkat nasional/internasional sebagai : Peserta
2. Memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik
3. Mengumpulkan data tenaga Honorer guru yang ada (TK, SD, SLTP, SMU & SMK)
4. Mengumpulkan data tenaga kesehatan yang ada (pada Rumah Sakit & Puskesmas)
5. Mengentri data kepegawaian kedalam media komputer
6. Mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada
7. Mengumpulkan Data Tata Naskah Digital metode penyimpanan dokumen kepegawaian
8. Tersedianya Arsip Digital ASN
9. Terlaksananya Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN
10. Terlaksananya Perbaikan data Anomali Mysapk
11. Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi
12. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

13. Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
14. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau
15. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana
16. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan
17. Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD
18. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang
19. Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan
20. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun

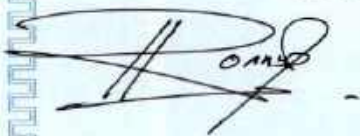
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda



Aji Rifqi Mirza, S.Kom

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198207292010011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengikuti Seminar, lokakarya dibidang manajemen PNS Tingkat nasional/internasional sebagai : Peserta	Sertifikat Mengikuti Seminar	Sertifikat	5
2	Memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai	Data	100
3	Mengumpulkan data tenaga Honorer guru yang ada (TK, SD, SLTP, SMU & SMK)	Jumlah Data Tenaga Guru	Data	50
4	Mengumpulkan data tenaga kesehatan yang ada (pada Rumah Sakit & Puskesmas)	Jumlah Data Tenaga Kesehatan	Data	50
5	Mengentri data kepegawaian kedalam media komputer	Jumlah Data Kepegawaian	Data	1000
6	Mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada	Jumlah Data pejabat Fungsional	Data	1000
7	Mengumpulkan Data Tata Naskah Digital metode penyimpanan dokumen kepegawaian	Jumlah	Data	8000
8	Tersedianya Arsip Digital ASN	Arsip Digital ASN	Data	8000
9	Terlaksananya Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN	Jumlah Data Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN	Data	200
10	Terlaksananya Perbaikan data Anomali Mysapk	Temuan data Anomali ASN Hasil Pemeriksaan dari BKN untuk ditindak lanjuti	Data	50
11	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Data ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	1

12.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
13.	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
14.	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
15.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16.	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
17.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
18.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Persentase capaian output kegiatan yang dicapai	Persen	100
19.	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
20.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelola Data Kepegawaian	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
AHLI MUDA



AJI RIFQI MIRZA, S.Kom

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198207292010011004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRWAN ANSYARI,SE**

Jabatan : **Menyusun Laporan Keuangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIF, SE**

Jabatan : **PJ.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
3. Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP;
4. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan);
5. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD;
6. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah;
7. Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
9. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP;
10. Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK
11. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

13. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan
14. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
15. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah
16. Kepatuhan Pelaporan P3DN;
17. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Meningkatnya Inovasi Daerah;
19. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape;
20. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
21. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

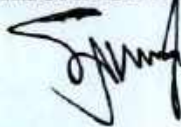
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET



SYARIF, SE
PENATA TINGKAT I/III/D
NIP. 19691231 200604 1 062

Pihak Pertama,
MENYUSUSUN LAPORAN KEUANGAN



MIRWAN ANSYARI, SE
PENATA MUDA TK.I (III/B)
NIP. 19831210 201001 1 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksannya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	350
2.	Terlaksannya evaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah evaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Dokumen	1
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Jumlah Laporan Dokumen LHKASN	Dokumen Laporan	1
4.	Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Jumlah bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Dokumen	250
5.	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Dokumen	430
6.	Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Laporan	1
7.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun pengeluaran sebagai bahan	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	JP	20
8	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan	Jumlah laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas	Laporan	12

9.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan penyampaian SKP 100% Paling Lambat Februari Setiap Tahun	Persen	100
----	--	--	--------	-----

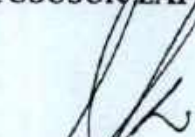
Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET



SYARIF, SE
PENATA TINGKAT I/III/D
NIP. 19691231 200604 1 062

Pihak Pertama,
MENYUSUSUN LAPORAN KEUANGAN



MIRWAN ANSYARI, SE
PENATA MUDA TK.I (III/B)
NIP. 19831210 201001 1 023



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDDY SETYA BUDHI**

Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIF, SE**

Jabatan : Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin;
2. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
3. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
6. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN
ASET



SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I/III/b
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN



DEDDY SETYA BUDHI
Pengatur/II/d
NIP. 197607242007011027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek	Terlaksananya kelancaran kegiatan menginput dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKAP);	Dokumen	12
2.	Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek	Terlaksananya kelancaran kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-Ganti Uang (GU) dan SPP Langsung (LS);	Dokumen	200
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN;	Orang/ Bulan	1120
4.	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	300
5.	Melakukan Tata Kelola Arsip	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Dokumen	300
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7.	Mewujudkan Tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan Penyampaian SKP paling lambat akhir pebruari setiap tahun	Persen	100
8.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun;	Jumlah Pelatihan,Bimtek dan Worksop	JAM PELAJARAN	20
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang	Laporan	5

	baik tertulis maupun lisan.	diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan..	oleh		
--	-----------------------------	---	------	--	--

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KASUBBAG KEUANGAN DAN
ASET**



SYARIF, SE

Penata Tingkat I/III/d
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN**



DEDDY SETYA BUDHI

Pengatur/II/d
NIP. 197607242007011027



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAYADI SAPUTRA**

Jabatan : **PENGELOLA PEMANFAATAN BMD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **SYARIF, SE**

Jabatan : **Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menginventarisasi seluruh barang inventaris yang di peroleh dari APBD atau melalui perolehan lain yang sah.
2. Membuat Laporan kartu inventaris barang dan Kartu Inventaris Ruangan.
3. Mencatat barang yang di perbaiki ke dalam kartu perbaikan barang.
4. Membuat dokumen usulan penetapan status, Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan dan usulan penghapusan barang inventaris.
5. Membuat Surat berita acara serah terima barang inventaris.
6. Membuat Laporan Semester Barang inventaris.
7. Menerima, mencatat dan membuat surat bukti pengeluaran ATK.
8. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun.
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN

ASET



SYARIF, SE

Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD



JAYADI SAPUTRA

Pengatur Tk. I/II.d
NIP. 19840722 200901 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menginventarisasi seluruh barang inventaris yang di peroleh dari APBD atau melalui perolehan lain yang sah	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi	Dokumen	1
2.	Membuat Laporan kartu inventaris barang dan Kartu Inventaris Ruangan	Jumlah kartu inventaris	Laporan	2
3.	Mencatat barang yang di perbaiki ke dalam kartu perbaikan barang	Jumlah barang yang di perbaiki kedalam kartu perbaikan barang	Unit/Barang	70
4.	Membuat dokumen usulan penetapan status, Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan dan usulan penghapusan barang inventaris	Jumlah dokumen	Dokumen	4
5.	Membuat Dokumen berita acara serah terima barang inventaris	Jumlah Dokumen berita acara serah terima barang inventaris	Surat	50
6.	Membuat Laporan Semester Barang inventaris	Jumlah Laporan setahun	Laporan	2
7.	Menerima, mencatat dan membuat surat bukti pengeluaran AT	Jumlah permohonan pada subbidang	Surat	50
8.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
9.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun	Jumlah Pelatihan	JP	20

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN
ASET.**



SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
PENGELOLA PEMANFAATAN BMD,



JAYADI SAPUTRA
Pengatur Tk.I/II.d
NIP. 19840722 200901 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BENNY RIVANI AKHTA**

Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIF, SE**

Jabatan : Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin;
2. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
3. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
6. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN
ASET



SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I/III/b
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN



BENNY RIVANI AKHTA
Pengatur/II/c
NIP. 197510232009021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek	Terlaksananya kelancaran kegiatan menginput dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKAP);	Dokumen	12
2.	Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek	Terlaksananya kelancaran kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-Ganti Uang (GU) dan SPP Langsung (LS);	Dokumen	200
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN;	Orang/ Bulan	1120
4.	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	300
5.	Melakukan Tata Kelola Arsip	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Dokumen	300
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7.	Mewujudkan Tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan Penyampaian SKP paling lambat akhir pebruari setiap tahun	Persen	100
8.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun;	Jumlah Pelatihan,Bimtek dan Worksep	JAM PELAJAR AN	20
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Terlaksananya Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang	Laporan	5

	baik tertulis maupun lisan.	diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan..		
--	-----------------------------	--	--	--

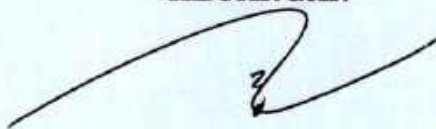
Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KASUBBAG KEUANGAN DAN
ASET**



SYARIF, SE
Penata Tingkat I/III/d
NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN**



BENNY RIVANI AKHTA
Pengatur/II/c
NIP. 197510232009021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.MD.AK**

Jabatan : **VERIFIKATOR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIF, S.E**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan tata kelola core values ASN "Ber-AKHLAK";
2. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
3. Mengumpulkan dan memeriksa data perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun rekaptulasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
6. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan Tata kelola Arsip perangkat daerah;
8. Tercapainya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah;
9. Melakukan pencatatan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan;
10. Menyediakan data pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
12. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA SUB BAG KEUANGAN DAN ASET,



SYARIF, S.E
Penata Muda Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19691231 200604 1 062

PIHAK PERTAMA
VERIFIKATOR KEUANGAN,



SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 19990508 202201 1 002

		Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari		
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan	Laporan	1
6	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 5 setiap bulannya	Persen	100
7	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi AS Minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
8	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	160

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA SUB BAG KEUANGAN DAN ASET,



SYARIF, S.E
Penata Muda Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19691231 200604 1 062

PIHAK PERTAMA
VERIFIKATOR KEUANGAN,



SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 19990508 202201 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYA INDRIANI, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **NUZULUL RAHMAN, S.Sos**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
2. Mengumpulkan dan memeriksa dokumen sebagai bahan kegiatan.
3. Menganalisis pengolahan dokumen kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan yang akan diolah.
5. Mengolah dan menyajikan data kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

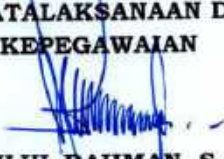
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**


NUZULUL RAHMAN, S.Sos

Penata (III/c)
NIP. 196812072000121003

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA,


MAYA INDRIANI, S.Sos

Penata Tk.I/III.d
NIP. 19801001 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERLINAWATI, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **NUZULUL RAHMAN, S.Sos**

Jabatan : **Pj. KASUBBAG UMUM DAN KETATALAKSANAAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sebagai bahan kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
3. Penganalisis pengolahan data kegiatan umum dan ketatalaksanaan.
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan yang akan diolah.
5. Mengolah dan menyajikan data kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan.
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

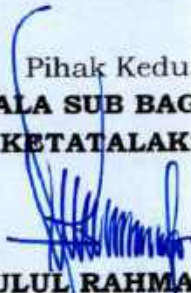
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**Pj. KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KETATALAKSANAAN**


NUZULUL RAHMAN, S.Sos
PENATA MUDA TK. I (III/b)
NIP. 196812072000121003

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA,


ERLINAWATI, S.Sos
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19720701 200012 2 003

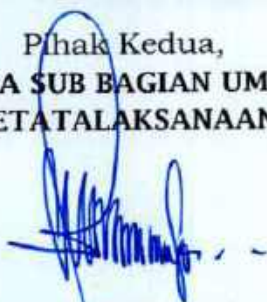
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan	Jumlah pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan	Dokumen	1
2.	Mengumpulkan dan memeriksa data sebagai bahan kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan	Jumlah data sebagai bahan dikumpul dan diperiksa	Dokumen	20
3.	Penganalisis pengolahan data kegiatan umum dan ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan	Dokumen	20
4.	Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan yang akan diolah	Jumlah rekapitulasi kegiatan	Dokumen	20
5.	Mengolah dan menyajikan data kegiatan urusan umum dan ketatalaksanaan	Jumlah dalam mengolah dan menyajikan data	Dokumen	20
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100

7.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun	Jumlah Pelatihan	JP	20
----	---	------------------	----	----

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

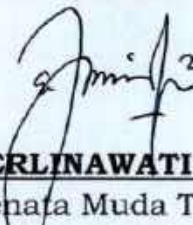
Pihak Kedua,
Pj. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN



NUZULUL RAHMAN, S.Sos
PENATA MUDA TK. I (III/b)
NIP. 196812072000121003

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA,



ERLINAWATI, S.Sos
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19720701 200012 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKA AFRIANTI, SE
NIP : 197704282007012028
Jabatan : PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUZULUL RAHMAN,S.Sos
NIP : 196812072000121003
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM,KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mengumpulkan Data Kehadiran PNS.
2. Mengumpulkan Laporan Kinerja Harian (LKH).
3. Mengendalikan data kepegawaian yang telah di kelompokkan.
4. Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan .
6. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun
7. Mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok .
8. Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN.
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN).
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak kedua akan melakukan :

1. Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini .
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua,



NUZULUL RAHMAN, S.Sos

NIP. 196812072000121003

Tenggarong, 24 Nopember 2024

Pihak Pertama,



RIKA AFRIANTI, SE

NIP. 197704282007012028

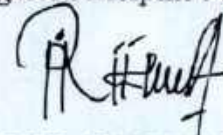
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengumpulkan Data-Data Kehadiran ASN & THL BKPSDM	Jumlah Data-Data Kehadiran PNS	Dokumen	1
2.	Mengumpulkan Laporan Kinerja Harian (LKH) ASN BKPSDM	Jumlah Laporan Kinerja Harian (LKH)	Berkas	85
3.	Mengendalikan data kepegawaian ASN & THL BKPSDM yang telah dikelompokkan	Jumlah data kepegawaian yang telah dikelompokkan	Dokumen	1
4.	Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM	Jumlah Tersusunnya laporan SKP ASN	Dokumen	1
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah melaksanakan Tugas Kedinasan	Dinas	9
6.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pelaksanaan	Persen	100 %
7.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Perkantoran Jumlah Pelaksanaan	Persen	100 %
8.	Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN	Tingkat Kepatuhan Laporan Pajak Tahunan (SPT)	Persen	100 %
9.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Tingkat Kepatuhan LKHASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100 %

Tenggarong, 24 Nopember 2024

Kepala Sub. Bagian Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian,

Pengelola Disiplin Pegawai,



NUZULUL RAHMAN ,S.Sos
NIP. 196812072000121003

RIKA AFRIANTI,SE
NIP. 197704282007012028



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASPANDI, SE**
NIP : 196804172006041004
Jabatan : **PENGELOLA KEPAGAWAIAN**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUZULUL RAHMAN, S.Sos**
NIP : 196812072000121003
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Menyiapkan Blangko kelengkapan pensiun.
2. Membuat surat pengantar Nota Dinas
3. Membuat daftar kehadiran Apel pagi setiap hari senin dan hari besar lainnya bagi ASN & THL.
4. Mengumpulkan data-data kehadiran Apel setiap hari senin dan Hari besar lainnya ASN & THL.
5. Mengumpul data Pengajuan kelengkapan Kenaikan Pangkat, KGB dan Cuti
6. Menerima surat masuk.
7. Mengelompokkan surat-surat masuk.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
9. Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM
10. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun.
11. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah
13. Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN

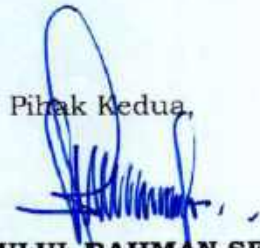
Pihak kedua akan melakukan :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Tenggarong, 24 Nopember 2024

Pihak Kedua,

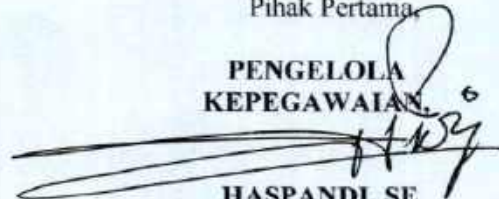


NUZULUL RAHMAN, SE

NIP. 196812072000121003

Pihak Pertama,

**PENGELOLA
KEPEGAWAIAN**



HASPANDI, SE

NIP. 196804172006041004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyiapkan Blangko kelengkapan pensiun	Jumlah data kelengkapan pensiun	data	1
2	Membuat surat pengantar Nota Dinas	Jumlah surat pengantar pensiun	Surat	6
3	Membuat Daftar kehadiran Apel Pagi setiap Hari senin dan Hari besar lainnya ASN & THL	Jumlah presentasi kehadiran PNS	dokumen	10
4	Mengumpulkan data-data kehadiran ASN dan THL Apel setiap Hari Senin dan hari besar lainnya.	Jumlah data-data kehadiran PNS	data	10
5	Mengumpul data Pengajuan kelengkapan Kenaikan Pangkat, KGB dan mempersiapkan blangko Cuti	Jumlah data kelengkapan Kenaikan Pangkat yang dipersiapkan	berkas	10
6	Menerima surat masuk;	Jumlah surat masuk yang di terima.	Surat	6
7	Mengelompokkan surat-surat masuk;	Jumlah surat-surat masuk yang di kelompokkan.	Surat	1
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan / Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah melaksanakan tugas kedinasan.	Dinas	4
9	Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM	Jumlah Rekapitulasi SKP ASN BKPSDM	Dokumen	1
10	Terlaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN 20 JP	Jumlah mengikuti pelatihan dan keterampilan	Persen	100%
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2024.	Persen	100%
12	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100%
13	Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN	Tingkat kepatuhan laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN	Persen	100%

Tenggarong, 24 Nopember 2024

**KASUBBAG. UMUM KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN,**

NUZULUL RAHMAN ,S.Sos
NIP. 196812072000121003

**PENGELOLA
KEPEGAWAIAN,**


HASPANDL SE
NIP. 196804172006041004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN BAHRUL**

Jabatan : **PENGELOLA PERJALANAN DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **NUZULUL RAHMAN,S.Sos**

Jabatan : **Pj.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima Dan Memeriksa Surat Perjalanan Dinas Dalam daerah
2. Menerima Dan Memeriksa Surat Perjalanan Dinas Luar daerah
3. Melakukan Penataan Dan Check list Surat Perjalanan Dinas Luar Daerah
4. Melakukan Penataan Dan Check list Surat Perjalanan Dinas Luar Daerah;
5. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah
6. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah
7. Melakukan Monitoring Surat Pencairan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah
8. Melaporkan Hasil Surat Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah
9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
10. Menyelesaikan Laporan harta kekayaan aparatur Sipil Negara (LHKASN)
11. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun

12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

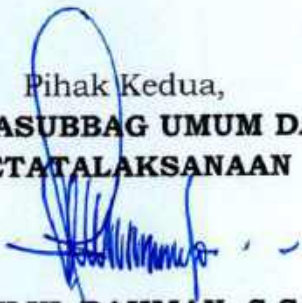
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

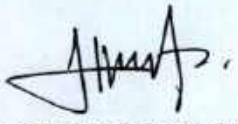
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**PJ. KASUBBAG UMUM DAN
KETATALAKSANAAN**


NUZULUL RAHMAN, S.Sos
Penata Muda Tk.I/III.b
NIP. 19681207 200012 1 003

Pihak Pertama,
PENGELOLA PERJALANAN DINAS

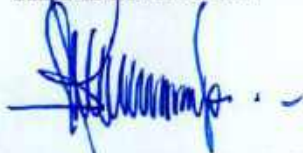

IRWAN BAHRUL
Pengatur/II.d
NIP. 19770618 200701 1 012

8.	Melaporkan Hasil Surat Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah Dalam Setahun	Laporan	300
9.	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
10.	Menyelesaikan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun	Jumlah Pelatihan	JP	20

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,

**Pj. KASUBBAG UMUM
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



NUZULUL RAHMAN, S.Sos
Penata Muda Tk. I/III.b
NIP. 19681207 200012 1 003

Pihak Pertama,

PENGELOLA PERJALANAN DINAS



IRWAN BAHRUL
Pengatur/II.d
NIP. 19770618 200701 1 012



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD AGUSTIAR, SE., M.Si**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINASAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksanannya Penyusunan Kebutuhan ASN
2. Terlaksanannya Administrasi cuti aparatur sipil negara
3. Menganalisis proses pemberhentian dan mengaktifkan Kembali sebagai PNS
4. Terlaksanannya Layanan Administrasi Pensiun PNS
5. Terlaksanannya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas laporan Harta kekayaan / SPT Tahunan
7. Terwujudnya Tingkat kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
8. Melaksanakan Pengembangan kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



MOHAMMAD AGUSTIAR, SE., M.Si

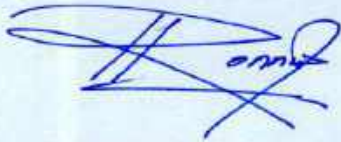
Penata Tk. I – III/d
NIP. 197608282008011014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Penyusunan Kebutuhan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Penyusunan dan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	2
2.	Terlaksanannya Administrasi cuti aparatur sipil negara	Jumlah usulan cuti ASN	Dokumen	1
3.	Menganalisis proses pemberhentian dan mengaktifkan Kembali sebagai PNS	Jumlah data penetapan pemberhentian dan mengaktifkan Kembali sebagai PNS	Dokumen	1
4.	Terlaksanannya Layanan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah usulan dan penetapan pensiun PNS	Dokumen	1
5.	Teraksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data Sistem Informasi Kepegawaian yang di input dalam aplikasi kepegawaian	Dokumen	1
6.	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas laporan Harta kekayaan / SPT Tahunan	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN per tanggal 31 Maret setiap tahun dan Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	2
7.	Terwujudnya Tingkat kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
8.	Melaksanakan Pengembangan kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Jumlah JP pada Pelatihan atau Bimtek yang telah di ikuti	JP	20

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA



MOHAMMAD AGUSTIAR, SE., M.Si

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197608282008011014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATKUROHMAN,S Sos

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya Dokumen usul cuti ASN
2. Tersedianya Dokumen usul Tapera
3. Tersedianya Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami
4. Tersedianya Dokumen usul Pensiun
5. Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi
6. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
7. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



FATKUROHMAN, S.Sos

Penata Tk. I – III/d

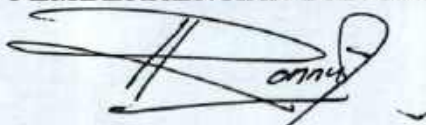
NIP. 196703111997031003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen usul cuti ASN	Jumlah Dokumen usul cuti ASN	ASN	50
2.	Tersedianya Dokumen usul Tapera	Jumlah Dokumen usul Tapera	Doku men	200
3.	Tersedianya Dokumen Kartu Isteri dan Kartu Suami	Jumlah Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami	Doku men	35
4.	Tersedianya Dokumen usul Pensiun	Jumlah Dokumen usul Pensiun	Doku men	200
5.	Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Jumlah Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Doku men	395
6.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
7.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Doku men	1
8.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN per 31 Maret 2023	Doku men	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Doku men	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
 NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



FATKUROHMAN, S Sos

Penata Tk. I – III/d
 NIP. 196703111997031003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH SOFIA HELDA
Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya data Penjagaan Cuti PNS
2. Tersedianya data usul cuti ASN
3. Tersedianya Dokumen Elektronik Cuti ASN yang diinfut pada aplikasi
4. Terlaksananya Rekonsiliasi peremajaan data
5. Tersedianya Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah
6. Tersedianya Data usul Karis Karsu yang diinfut pada aplikasi
7. Tersedianya Data usul TAPERA pensiun yang diinfut pada aplikasi
8. Tersedianya dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera Pensiun
9. Tersedianya Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah
10. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
11. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
12. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

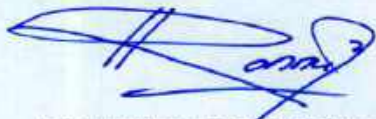
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



SYARIFAH SOFIA HELDA

Penata Muda TK.I – III/b
NIP. 197208292000122002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data Penjagaan Cuti PNS	Jumlah data Penjagaan Cuti ASN	Data	150
2	Tersedianya data usul cuti ASN	Jumlah data usul cuti	Berkas	150
3	Tersedianya Dokumen Elektronik Cuti ASN yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Dokumen Elektronik Cuti	Doku men	150
4	Terlaksananya Rekonsiliasi peremajaan data	Jumlah Rekonsiliasi peremajaan data	Laporan	1
5	Tersedianya Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah	Jumlah Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah	Data	50
6	Tersedianya Data usul Karis Karsu yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Data usul Karis Karsu	Data	110
7	Tersedianya Data usul TAPERA pensiun yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Data usul TAPERA pensiun	Data	200
8	Tersedianya dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera Pensiun	Jumlah dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera	Doku men	110
9	Tersedianya Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah	Doku men	150
10	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Jumlah Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
11	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Doku men	1
12.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN per tanggal 31 Maret 2023	Doku men	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Doku men	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



SYARIFAH SOFIA HELDA

Penata Muda TK.I – III/b
NIP. 197208292000122002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI NOVITA YANTI, S.STP**

Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN SDM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINASAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya data Kebutuhan ASN
2. Tersedianya Dokumen Usul Persetujuan Kebutuhan JF
3. Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Kebutuhan JF
4. Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Formasi Kebutuhan ASN
5. Tersedianya Data Usul PPPK
6. Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan ASN
7. Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Calon PPPK
8. Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan PPPK
9. Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja PPPK
10. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun
11. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun
12. Menyelesaikan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP) di bidang
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

**KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
NIP. 19791126200711012

Pihak Pertama,

ANALIS PERENCANAAN SDM,



YUNI NOVITA YANTI, S.STP
NIP. 199403292016092001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data Kebutuhan ASN	Jumlah data Kebutuhan ASN	Data	6
2.	Tersedianya Dokumen Usul Persetujuan Kebutuhan JF	Jumlah Dokumen Usul Persetujuan Kebutuhan JF	Dokumen	10
3.	Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Kebutuhan JF	Jumlah Dokumen Usul Penetapan Kebutuhan JF	Dokumen	10
4.	Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Formasi Kebutuhan ASN	Jumlah Dokumen Usul Penetapan Formasi Kebutuhan ASN	Dokumen	600
5.	Tersedianya Data Usul PPPK	Jumlah Data Usul PPPK	Data	500
6.	Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan ASN	Dokumen	600
7.	Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Calon PPPK	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Penetapan Calon PPPK	Dokumen	500
8.	Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan PPPK	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan PPPK	Dokumen	500
9.	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja PPPK	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja PPPK	Dokumen	500
10.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Jumlah pelatihan minimal 20 JP per Tahun yang diikuti	Sertifikat	20 JP

11	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP) di bidang	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
12.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

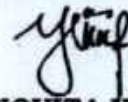
Pihak Kedua,
**KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
NIP. 19791126200711012

Pihak Pertama,

ANALIS PERENCANAAN SDM,



YUNI NOVITA YANTI, S.STP
NIP. 199403292016092001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAIDAH ARIANI, SE**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINASAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengelola data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput pada Aplikasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas data anomali pada Simpeg dan MyASN;
3. Melaksanakan usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);
4. Mengelompokkan Data Kepegawaian ke dalam buku Statistik;
5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
6. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

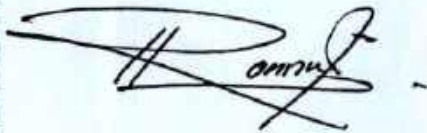
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN,**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



SAIDAH ARIANI, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197412252010012006

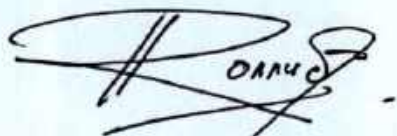
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput pada Aplikasi Kepegawaian;	Jumlah Data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput	Dokumen	14
2	Terlaksananya rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas data anomali pada Simpeg dan MyASN;	Jumlah rekonsiliasi peremajaan dan perbaikan disparitas data	Data	1109
3	Tersedianya dokumen usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);	Jumlah dokumen usulan pemuktahiran data Konversi NIP	Dokumen	2
4	Tersedianya rekapitulasi Data Kepegawaian ASN perangkat daerah;	Jumlah rekap data kepegawaian yang dibuat untuk pelaporan	Laporan	12
5	Tersedianya Data Kepegawaian yang dikelompokkan dalam Buku Statistik;	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelompokkan dalam Buku Statistik	Buku	1
6	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun;	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang diikuti minimal 20 JP	Persen	100

7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
---	--	---	--------	-----

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN,**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



SAIDAH ARIANI, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197412252010012006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BEKTI KRISTIANI, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINSAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya Dokumen Usul Pensiun PNS
2. Tersedianya data usulan Pensiun PNS
3. Mendokumentasikan Dokumen Usul Pensiun PNS
4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun
5. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Bidang
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

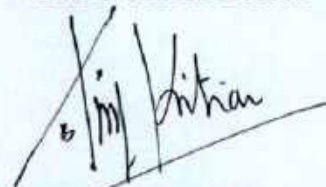


RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I-III/d

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



BEKTI KRISTIANI, S.Sos

Penata Muda – III/a

NIP.197905052009022001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Verifikasi Usul Pensiun PNS	Jumlah Dokumen Verifikasi Usul Pensiun PNS	Dokumen	600
2.	Tersedianya data usulan Pensiun PNS	Jumlah Data usulan pensiun PNS yang dikelola	Data	600
3.	Mendokumentasikan Dokumen Usul Pensiun PNS	Jumlah Dokumen Usul Pensiun PNS	Dokumen	600
4.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Jumlah pelatihan minimal 20 JP per Tahun yang diikuti	Sertifikat	20 JP
5.	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari	Dokumen	1
6.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Dokumen	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERENTIAN DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
 NIP.197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



BEKTI KRISTIANI, S.Sos
 NIP.197905052009022001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASA FARRIHA, S.Ak

Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
2. Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/belum terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
4. Terlaksananya layanan Fasilitasi Profesi ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
5. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
6. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
7. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

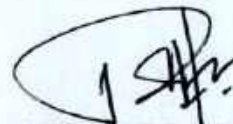
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



ASA FARRIHA, S.Ak

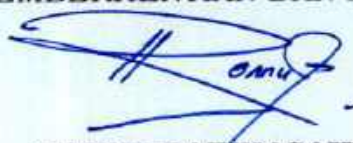
Penata Muda – III/a
NIP. 198207112011012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Fasilitas lembaga Profesi ASN	Doku men	150
2.	Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/ belum terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data ikatan Profesi ASN yang sudah/ belum terbentuk	Data	15
3.	Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data per Profesi ASN yang sudah terbentuk	Data	150
4.	Terlaksananya layanan Fasilitas Profesi ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Fasilitas Profesi ASN	Data	150
5.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Jumlah Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
6.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
7.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN Per 31 Maret 2023	Dokumen	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

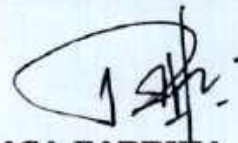
Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
 NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



ASA FARRINA, S.Ak

Penata Muda – III/a
 NIP. 198207112011012001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ramadhani, S.Tr.IP

Jabatan : Pengelola Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ronny Fatinasahrani, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya Data Kebutuhan ASN
2. Tersedianya Data Usulan Pensiun PNS
3. Tersedianya Data Usul PPPK
4. Tersedianya Dokumen Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP)
5. Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pensiun
6. Tersedianya Data Peremajaan usul Pensiun pada Aplikasi SIASN
7. Tersedianya Data Verifikasi dan perbaikan usul Pensiun
8. Tersedianya Dokumen Persetujuan Teknis Penetapan Pensiun PNS
9. Terlaksananya Peremajaan Data Dokumen Penetapan Pensiun pada Aplikasi Kepegawaian
10. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun
11. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun
12. Menyelesaikan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di bidang
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

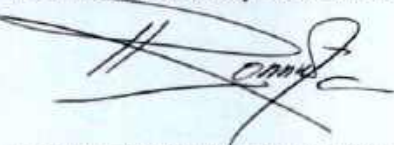
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

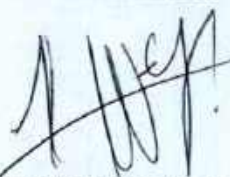
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, dan Informasi**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
NIP.197911262007011012

Pihak Pertama,
Pelaksana



WAHYU RAMADHANI, S.Tr.IP
NIP.200001072022081001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Kebutuhan ASN	Jumlah Data Kebutuhan ASN yang dikelola	Data	6
2.	Tersedianya Data Usulan Pensiun PNS	Jumlah Data usulan pensiun PNS yang dikelola	Data	500
3.	Tersedianya Data Usul PPPK	Jumlah Data Usul PPPK yang dikelola	Data	1200
4.	Tersedianya Dokumen Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP)	Jumlah Dokumen Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP)	Dokumen	575
5.	Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pensiun	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pensiun	Dokumen	575
6.	Tersedianya Data Peremajaan usul Pensiun pada Aplikasi SIASN	Jumlah Data Peremajaan usul Pensiun pada Aplikasi SIASN yang dikelola	Data	575
7.	Tersedianya Data Verifikasi dan perbaikan usul Pensiun	Jumlah Data Verifikasi dan perbaikan usul Pensiun yang dikelola	Data	575
8.	Tersedianya Dokumen Persetujuan Teknis Penetapan Pensiun PNS	Jumlah Dokumen Persetujuan Teknis Penetapan Pensiun PNS	Dokumen	575
9.	Terlaksananya Data Peremajaan Dokumen Penetapan Pensiun pada Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Peremajaan Data Dokumen Penetapan Pensiun pada Aplikasi Kepegawaian	Data	575
10.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Jumlah pelatihan minimal 20 JP per Tahun yang diikuti	Sertifikat	20 JP

11.	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di bidang	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
12.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKASN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 31 Maret setiap tahun	Persen	100

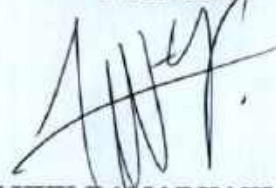
Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, dan Informasi**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
NIP.197911262007011012

Pihak Pertama,
Pelaksana



WAHYU RAMADHANI, S.Tr.IP
NIP.200001072022081001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSDIANA NUR**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINASAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya dokumen Administrasi Fasilitas Lembaga Profesi ASN;
2. Tersediannya data ikatan profesi ASN yang sudah/belum terbentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Tersedianya data anggota ikatan profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Terlaksananya layanan Fasilitas Profesi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
6. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Bidang
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN**

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197911262007011012



MUSDIANA NUR
Pengatur Tk.I (II/d)
NIP. 197109212010012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen Administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;	Jumlah dokumen administrasi fasilitasi Lembaga profesi ASN	Dokumen	150
2	Tersediannya data ikatan profesi ASN yang sudah/belum terbentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;	Jumlah data ikatan profesi ASN yang sudah/belum terbentuk	Data	15
3	Tersedianya data anggota ikatan profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;	Jumlah data per profesi ASN yang sudah terbentuk	Data	150
4	Terlaksananya layanan Fasilitasi Profesi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;	Jumlah layanan fasilitasi profesi ASN	Data	150
5	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun;	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang diikuti minimal 20 JP	JP	20

6	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari	Dokumen	1
7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



MUSDIANA NUR

Pengatur Tk.I (II/d)
NIP. 197109212010012001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSDIANSYAH
Jabatan : PENGELOLA PROFESI SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitas Lembaga Profesi ASN
2. Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/belum terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
4. Terlaksananya layanan Fasilitas Profesi ASN dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
5. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
6. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
7. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGELOLA PROFESI SDM



RUSDIANSYAH

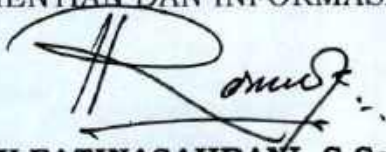
Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197502202007011014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Dokumen	150
2.	Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/ belum terbentuk dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah data ikatan Profesi ASN yang sudah/ belum terbentuk	Data	15
3.	Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah data per profesi ASN yang sudah terbentuk	Data	150
4.	Terlaksananya layanan Fasilitas Profesi ASN dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Fasilitas Profesi ASN	Data	150
5.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Jumlah Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
6.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen	1
7.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN Per 31 Maret 2023	Dokumen	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN


RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGELOLA PROFESI SDM


RUSDANSYAH

Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197502202007011014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAHRIANSYAH**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RONNY FATINASAHRANI, S.Sos**

Jabatan : **KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Mengelola data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput pada Aplikasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas data anomali pada Simpeg dan MyASN;
3. Melaksanakan usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);
4. Mengelompokkan Data Kepegawaian ke dalam buku Statistik;
5. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
6. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Melaksanakan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

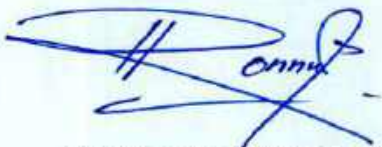
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN,**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



DAHRIANSYAH

Pengatur Tk.I (II/d)

NIP. 197502032010011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput pada Aplikasi Kepegawaian;	Jumlah Data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput	Dokumen	14
2	Terlaksananya rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas data anomali pada Simpeg dan MyASN;	Jumlah rekonsiliasi peremajaan dan perbaikan disparitas data	Data	1527
3	Tersedianya dokumen usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);	Jumlah dokumen usulan pemuktahiran data Konversi NIP	Dokumen	1
4	Tersedianya rekapitulasi Data Kepegawaian ASN per perangkat daerah;	Jumlah rekap data kepegawaian yang dibuat untuk pelaporan	Laporan	12
5	Tersedianya Data Kepegawaian yang dikelompokkan dalam Buku Statistik;	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelompokkan dalam Buku Statistik	Buku	1
6	Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun;	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang diikuti minimal 20 JP	JP	20

7	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari	Dokumen	1
8	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN,**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



DAHRIAH SYAH

Pengatur Tk.I (II/d)
NIP. 197502032010011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL KHODIRIYAH
Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya data Penjagaan Cuti PNS
2. Tersedianya data usul cuti ASN
3. Tersedianya Dokumen Elektronik Cuti ASN yang diinfut pada aplikasi
4. Terlaksananya Rekonsiliasi peremajaan data
5. Tersedianya Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah
6. Tersedianya Data usul Karis Karsu yang diinfut pada aplikasi
7. Tersedianya Data usul TAPERA pensiun yang diinfut pada aplikasi
8. Tersedianya dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera Pensiun
9. Tersedianya Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah
10. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
11. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
12. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

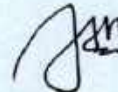
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



NURUL KHODIRIYAH

Pengatur TK.I – II/d
NIP. 197602092008012017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data Penjagaan Cuti PNS	Jumlah data Penjagaan Cuti ASN	Data	150
2	Tersedianya data usul cuti ASN	Jumlah data usul cuti	Berkas	150
3	Tersedianya Dokumen Elektronik Cuti ASN yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Dokumen Elektronik Cuti	Doku men	150
4	Terlaksananya Rekonsiliasi peremajaan data	Jumlah Rekonsiliasi peremajaan data	Laporan	1
5	Tersedianya Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah	Jumlah Data tembusan cuti ASN dari Perangkat Daerah	Data	50
6	Tersedianya Data usul Karis Karsu yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Data usul Karis Karsu	Data	110
7	Tersedianya Data usul TAPERA pensiun yang diinfut pada aplikasi	Jumlah Data usul TAPERA pensiun	Data	200
8	Tersedianya dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera Pensiun	Jumlah dokumen usul Karis, Karsu dan Tapera	Doku men	110
9	Tersedianya Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Elektronik Tembusan Cuti Perangkat Daerah	Doku men	150
10	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Jumlah Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
11	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Doku men	1
12.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN per tanggal 31 Maret 2023	Doku men	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Doku men	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I - III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA



NURUL KHODIRIYAH

Pengatur TK.I - II/d
NIP. 197602092008012017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAMSU ARIJAL
Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya Dokumen usul cuti ASN
2. Tersedianya Dokumen usul Tapera
3. Tersedianya Dokumen usul Kartu Istri dan Kartu Suami
4. Tersedianya Dokumen usul Pensiun
5. Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi
6. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
7. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



SAMSU ARIJAL

Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197806152007011024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen usul cuti ASN	Jumlah Dokumen usul cuti ASN	ASN	50
2.	Tersedianya Dokumen usul Tapera	Jumlah Dokumen usul Tapera	Doku men	200
3.	Tersedianya Dokumen Kartu Isteri dan Kartu Suami	Jumlah Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami	Doku men	35
4.	Tersedianya Dokumen usul Pensiun	Jumlah Dokumen usul Pensiun	Doku men	200
5.	Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Jumlah Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Doku men	395
6.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
7.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Doku men	1
8.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN per 31 Maret 2023	Doku men	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Doku men	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I - III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



SAMSU ARIJAL

Pengatur Tk. I - II/d
NIP. 197806152007011024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya Dokumen usul cuti ASN
2. Tersedianya Dokumen usul Tapera
3. Tersedianya Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami
4. Tersedianya Dokumen usul Pensiun
5. Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi
6. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
7. Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;
9. Terlaksananya " Gerakan Etam Mengaji " (GEMA)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen usul cuti ASN	Jumlah Dokumen usul cuti ASN	ASN	50
2.	Tersedianya Dokumen usul Tapera	Jumlah Dokumen usul Tapera	Doku men	200
3.	Tersedianya Dokumen Kartu Isteri dan Kartu Suami	Jumlah Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami	Doku men	35
4.	Tersedianya Dokumen usul Pensiun	Jumlah Dokumen usul Pensiun	Doku men	200
5.	Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Jumlah Dokumen layanan administrasi data dan informasi	Doku men	395
6.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi ASN	JP	20
7.	Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP akhir bulan Februari setiap tahun	Doku men	1
8.	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN per 31 Maret 2023	Doku men	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Doku men	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
 PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN**



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
 NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



RIDWAN

Pengatur Tk. I – II/d
 NIP. 197303052007011039

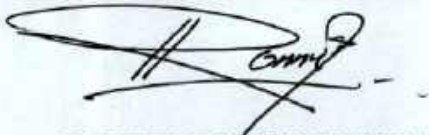
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I – III/d
NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



RIDWAN

Pengatur Tk. I – II/d
NIP. 197303052007011039



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANWAR WAHID, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, S.E**

Jabatan : **Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Menyediakan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;
- 2 Menyusun Laporan Pengelolaan Assesment Center;
- 3 Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 4 Terpenuhiya Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan;
- 5 Menyelesaikan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 6 Melaksanakan Verifikasi terhadap Input e-Pantau;
- 7 Menyediakan Data Hasil Analisis standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan);
- 8 Menyelesaikan Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
- 9 Merealisasikan Anggaran Berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan;
- 10 Menyediakan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan;
- 11 Memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi bagi perempuan;
- 12 Menyediakan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- 13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

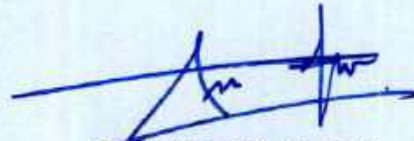
Pihak Kedua,
**Pj. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR**



MUKHDAN, S.E
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA



ANWAR WAHID, S.Sos
Penata (III/c)

NIP. 197211102006041024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya penyusunan profil kompetensi pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Data profil kompetensi pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Pengelolaan Assement Center;	Jumlah peserta yang mengikuti Assement Center;	Laporan	1
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN per tanggal 31 Maret setiap tahun	Laporan	1
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi per tanggal 10 setiap bulan	Persen	80 – 100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	80 – 100
7	Menyelesaikan Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);	Persen	100

8	Merealisasikan Anggaran Berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan;	Tingkat presentasi realisasi anggaran berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan;	Persen	70 %
9	Terlaksannya Ketepatan dalam menyediakan Dokumen Manajemen Risiko Pada Sub Kegiatan Per Triwulan	Prosedur penyusunan Manajemen Risiko dan laporan Pengendalian Manajemen Risiko	Laporan	4
10	Memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi bagi perempuan;	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi bagi perempuan	ASN	40
11	Menyediakan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Jumlah laporan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Presentasi	1
12	Mengikuti pengembangan kompetensi ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 Tahun	Jumlah Jam Pembelajaran pengembangan kompetensi yang diikuti (JP)	Jam Pembelajaran (JP)	20
13	Memfasilitasi PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Seleksi Terbuka JPT Pratama	Laporan	1
14	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;	Jumlah terlaksananya tugas dan ketepatan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Assessment Centre	1.950.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.950.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. KEPALA BIDANG
PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR


MUKHDAN, S.E
Penata (III/c)
NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM
APARATUR AHLI MUDA


ANWAR WAHID, S.Sos
Penata (III/c)
NIP. 197211102006041024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DECKY GUNARYANA, SH**

Jabatan : **ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;
2. Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
3. Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring;
4. Tersedianya Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikuti Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis;
5. Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
6. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan;
7. Tersedianya data calon peserta pelatihan
8. Tersedianya Surat Pemanggilan /Surat Tugas PNS yang akan mengikuti pelatihan ;
9. Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;
10. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan;

11. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.
12. Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024
13. Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024;
14. Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;
15. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**Pj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN**


MUKHDAN, SE
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**


DECKY GUNARYANA, SH
Penata Muda (III/a)

NIP. 197101122007011013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun.	Jumlah Jam Pelatihan yang telah diikuti;	Jam Pelatihan	20
2.	Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.	Jumlah dokumen hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;	Data	5
3.	Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring.	Jumlah dokumen Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring	Dokumen	5
4.	Tersedianya Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikuti Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis.	Jumlah PNS Perangkat Daerah yang akan diikuti Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring	Surat	2
5.	Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikuti Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring	Laporan	20
6.	Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	SK	35

7.	Tersedianya data calon peserta pelatihan	Jumlah data yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan	Data	12
8.	Tersedianya Surat Pemanggilan /Surat Tugas PNS yang akan mengikuti pelatihan	Jumlah Surat Pemanggilan ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pelatihan	Surat	12
9.	Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan.	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan	Laporan	15
10.	Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.	Jumlah data pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan	Data	4
11.	Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024	Laporan harta kekayaan yang disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN	Laporan	1
12.	Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024.	SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024	Laporan	1
13.	Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024.	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan	Dokumen	1

14.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Jumlah dokumen PK	Dokumen	1
-----	--	-------------------	---------	---

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

**Pj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN**


MUKHDAN, SE
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**


DECKY GUNARYANA, SH
Penata Muda (III/a)

NIP. 197101122007011013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHERMAN, SH
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUKHDAN, SE
Jabatan : Pj. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
16. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN,



MUKHDAN, SE

Penata / III/c

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR
AHLI MUDA,



SUBERMAN, SH

Penata / III/c

NIP. 198105212012121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Pelatihan Teknis	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pelatihan Teknis	Persen	80 – 100
2	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Jam Pelatihan yang telah diikuti	Jam Pelatihan	20
3	Tersedianya data Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024	Data Pengembangan kompetensi yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PNS melalui coaching/mentoring	Laporan pelaksanaan coaching/mentoring PNS	Laporan	1
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja	ASN	3879
6	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis	ASN	6533
7	Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian LHKAN/SPT Tahunan	Data harta kekayaan yang disampaikan melalui aplikasi paling lambat tanggal 31 Maret 2024	Laporan	1
8	Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah dokumen SKP yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Januari 2024	Dokumen	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
9	Terlaksananya pengisian data capaian kegiatan dan realisasi keuangan pada aplikasi E-Pantau	Persentase data yang diinput ke dalam aplikasi E-Pantau	Persen	80-100
10	Tersedianya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat 1 bulan setelah APBD ditetapkan	Dokumen	1
11	Terlaksananya realisasi anggaran sub kegiatan berdasarkan SPD yang diterbitkan	Persentase anggaran yang terealisasi berdasarkan SPD	Persen	70-100
12	Tersedianya laporan pelaksanaan manajemen risiko pada sub kegiatan	Jumlah laporan yang disampaikan per triwulan	Laporan	4

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	2.150.000.000	APBD
2	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.940.070.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.090.070.000	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN,


MUKHDAN, SE
Penata / III/c

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR
AH LI MUDA,


SUHERMAN, SH
Penata / III/c

NIP. 198105212012121002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIAN MAYASARI, SE**

Jabatan : **ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;
2. Tersedianya data calon peserta pelatihan;
3. Tersedianya Surat Pemanggilan/ Surat Tugas ASN yang akan Mengikuti Pelatihan;
4. Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan;
5. Tersedianya Data Calon Peserta Dan surat Pemanggilan/ surat tugas ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti dan pilihan ;
6. Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan ;
7. Tersedianya Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024;
8. Tersedianya SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024 ;
9. Tersedianya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;

10. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Tenggarong, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**PJ.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN,**


MUKHDAN, SE
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
**ANALIS FASILITASI
PENINGKATAN KOMPETENSI,**


DIAN MAYASARI, SE
Penata TK.I/III.d

NIP. 197101122007011013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun.	Jumlah Jam Pelatihan yang telah diikuti;	Jam Pelatihan	20
2.	Tersedianya data calon peserta pelatihan	Jumlah dokumen hasil ASN yang telah mengikuti Peningkatan kapasitas melalui pelatihan;	Dokumen	4
3.	Tersedianya Surat Pemanggilan/ Surat Tugas ASN yang akan Mengikuti Pelatihan.	Jumlah surat pemanggilan / surat tugas pelatihan PNS;	Dokumen	4
4.	Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan.	Jumlah ketersediaan kelengkapan kegiatan (Absen dan kelengkapan peserta lainnya;	Pelatihan	13
5.	Tersedianya Data Calon Peserta Dan surat Pemanggilan/ surat tugas ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti dan pilihan	Jumlah surat pemanggilan / surat tugas pelatihan PNS;	Dokumen	7
6.	Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan.	Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan;	Pelatihan	21
7.	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024; Surat Keputusan	Jumlah dokumen laporan harta kekayaan yang disampaikan melalui aplikasi SIHARKA ASN;	Laporan	1

8.	Tersedianya SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024.	Jumlah Laporan SPT Tahunan disampaikan paling lambat 31 Maret 2024;	Laporan	1
9.	Tersedianya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024	Jumlah Dokumen SKP yang disampaikan;	Dokumen	1
10.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan	Jumlah Dokumen PK;	Dokumen	1

Tenggarong, 25 November 2024

**Pj. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN,**


MUKHDAN, SE

Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
**ANALIS FASILITASI
PENINGKATAN KOMPETENSI,**



DIAN MAYASARI, SE

Penata TK I (III/d)

NIP. 198507272010012055



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UMI WINARSIH, SE**

Jabatan : **ANALIS DIKLAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Membuat konsep pemberitahuan Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional ke Perangkat Daerah;
2. Mengumpulkan data dan menerima rekapitulasi calon peserta Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional;
3. Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat Aparatur;
4. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Diklat Aparatur;
5. Memfasilitasi Evaluasi pasca pelatihan;
6. Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
7. Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
8. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
10. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;

11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN**

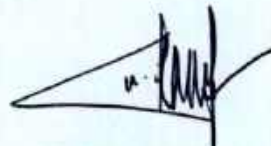


MUKHDAN, SE

Penata / III/c

NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS DIKLAT



UMI WINARSIH, SE

Penata Muda / III/a

NIP. 19811012 200604 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Membuat konsep pemberitahuan Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional ke Perangkat Daerah	Jumlah konsep pemberitahuan Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional ke Perangkat Daerah	Dokumen	5
2.	Mengumpulkan data dan menerima rekapitulasi calon peserta Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional;	Jumlah data dan menerima rekapitulasi calon peserta Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional;	Dokumen	5
3.	Melakukan Analisis Kebutuhan Diklat Aparatur;	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Aparatur;	Dokumen	1
4.	Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Diklat Aparatur;	Jumlah dokumen analisis dan evaluasi pelaksanaan Diklat Aparatur;	Dokumen	1
5.	Memfasilitasi Evaluasi pasca pelatihan;	Jumlah fasilitasi Evaluasi pasca pelatihan;	Dokumen	1
6.	Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persentase Penyampaian dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
7.	Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	1

9.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Jam Pelajaran	20
10.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Tingkat Kepatuhan LHKAN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
11.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah terlaksananya tugas dan ketetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN


MUKHDAN, SE
 Penata / III/c

NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS DIKLAT



UMI WINARSIH, SE
 Penata Muda / III/a

NIP. 19811012 200604 2 024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. YAMIN, S.Sos**

Jabatan : **PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Membuat Karangka Acuan Kegiatan Orientasi PPPK, Diklat Pra Jabatan, Diklat Kepemimpinan Nasional (PIM.II), Diklat Administrator (PIM.III), Diklat Pengawas (PIM.IV) sesuai NSPK;
2. Melaksanakan Penelaahan Permohonan Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebelum Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan;
3. Menghimpun dan Mengevaluasi data ASN yang akan diikutkan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK;
4. Menghimpun sertifikat dan Laporan (Proper) hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan peserta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
5. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK;
6. Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
7. Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
8. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

10. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**



MUKHDAN, SE

Penata / III/c
NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT



M. YAMIN, S.Sos
Penata Muda / III/a
NIP. 19680401 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Membuat Karangka Acuan Kegiatan Orientasi PPPK, Diklat Pra Jabatan, Diklat Kepemimpinan Nasional (PIM.II), Diklat Administrator (PIM.III), Diklat Pengawas (PIM.IV) sesuai NSPK	Jumlah Karangka Acuan Kegiatan Orientasi PPPK, Diklat Pra Jabatan, Diklat Kepemimpinan Nasional (PIM.II), Diklat Administrator (PIM.III), Diklat Pengawas (PIM.IV) sesuai NSPK	Dokumen	2
2.	Melaksanakan Penelaahan Permohonan Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebelum Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan;	Jumlah Telaahan Pelaksanaan Diklat sebelum Diklat dilaksanakan;	Dokumen	5
3.	Menghimpun dan Mengevaluasi data ASN yang akan diikutkan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK;	Jumlah evaluasi data ASN yang akan diikutkan Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	5
4.	Menghimpun sertifikat dan Laporan (Proper) hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan peserta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;	Jumlah sertifikat dan Laporan (Proper) hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan peserta	Dokumen	5
5.	Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK;	Jumlah laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Laporan	5

6.	Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persentase Penyampaian dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
7.	Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	1
8.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Jam Pelajaran	20
9.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Tingkat Kepatuhan LHKAN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
10.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah terlaksananya tugas dan ketetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN**


MUKHDAN, SE
Penata / III/c
NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT


M. YAMIN, S.Sos
Penata Muda / III/a
NIP. 19680401 201001 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. M. FAISYAL WAHYUDI, S.Sos
Jabatan : ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUKHDAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR SIPIL NEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
- 2 Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 3 Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)
- 4 Tersusunnya profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi
- 5 Tersusunnya laporan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai
- 6 Tersedianya Data Assesment Center
- 7 Tersedianya data standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan)
- 8 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

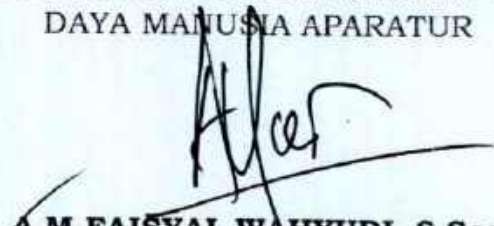


MUKHDAN, SE

PENATA TINGKAT I (III/c)
NIP. 19740707199803005

Pihak Pertama,

ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR



A.M. FAISYAL WAHYUDI, S.Sos

PENATA MUDA (III/b)
NIP. 197903292007011008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

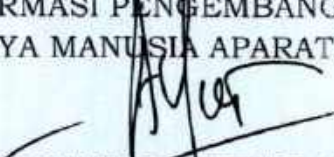
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tingkat kepatuhan atas LHKAN	Persentase tingkat kepatuhan LHKAN Per 30 Maret 2024	Persen	100
2	Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 28 Januari 2024	Persen	100
3	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persentase penyelesaian dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
4	Tersusunnya profil PNS berdasarkan hasil assesment center pemetaan talenta/ kompetensi	dokumen profil PNS berdasarkan hasil assesment center pemetaan talenta/ kompetensi	Dokumen	1
5	Tersusunnya laporan kesenjangan kompetensi pegawai	Laporan kesenjangan kompetensi pegawai	Dokumen	1
6	Tersedianya Data Assesment Center	Data PNS yang mengikutsertakan Assesment Center	Dokumen	1
7	Tersedianya data standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Jumlah data standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Dokumen	1
8	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan	Bukti fisik atau digital yang menunjukkan bahwa tugas telah dilaksanakan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI APARATUR**


MUKHDAN, SE
 PENATA TINGKAT I (III/c)
 NIP. 19740707199803005

Pihak Pertama,
**ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA APARATUR**


A.M. FAISYAL WAHYUDI, S.Sos
 PENATA MUDA (III/b)
 NIP. 197903292007011008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FIKTOR, SP**
Jabatan : **ANALIS DIKLAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR SIPIL NEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
- 2 Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 3 Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
- 4 Terlaksananya Konsep Pemberitahuan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota ke OPD;
- 5 Tersedianya Data Pejabat Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di luar Guru dan Kesehatan;
- 6 Terfasilitasinya PNS yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
- 7 Terlaksananya verifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
- 8 Tersedianya laporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
- 9 Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau;
- 10 Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

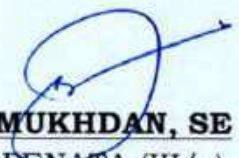
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau di mundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

KutaiKartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR



MUKHDAN, SE
PENATA (III/c)

NIP. 19740707199803005

Pihak Pertama,
ANALIS DIKLAT



FIKTOR, SP

Penata Muda/ III/a
NIP. 19790509 200701 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATENKUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tingkat kepatuhan atas LHKAN	Persentase tingkat kepatuhan LHKAN Per 30 Maret 2024	Persen	100
2	Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 28 Januari 2024	Persen	100
3	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persentase penyelesaian dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
4	Terlaksananya Konsep Pemberitahuan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota ke OPD	Jumlah Konsep Pemberitahuan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota ke OPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Data Pejabat Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di luar Guru dan Kesehatan	Jumlah laporan Pejabat Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di luar Guru dan Kesehatan	Dokumen	1
6	Terfasilitasinya PNS yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;	Jumlah PNS yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota	Orang	17
7	Terlaksananya verifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen verifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota	Dokumen	1
8	Tersedianya laporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota.	Laporan	1
9	Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau	Jumlah Verifikasi terhadap Input e-Pantau	Laporan	1

10	Terlaksananya Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	1
----	--	--	----------	---

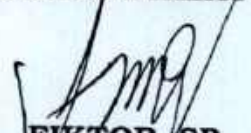
KutaiKartanegara, 25 November 2024

PihakKedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR


MUKHDAN, SE
PENATA (III/c)

NIP. 19740707199803005

PihakPertama,
ANALIS DIKLAT


FIKTOR, SP

Penata Muda/ III/a

NIP. 19790509 200701 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFKI DARMAWAN, S.Tr.IP
Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUKHDAN, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Tersedianya profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;
- 2 Terselaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- 3 Terselaikannya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 4 Terselaikannya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
- 5 Tersedianya informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- 6 Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan
- 7 Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) Tahun

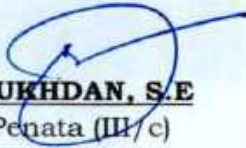
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN


MUKHDAN, S.E
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



MUHAMMAD RIFKI DARMAWAN, S.Tr.IP

Penata Muda (III/a)
NIP. 199905202022081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	Data profil kompetensi pegawai	Data	50
2	Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian LHKAN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persentase tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Laporan	1
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
4	Tersusunnya perjanjian kinerja PD (Maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persentase ASN Bidang PSDA yang menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
5	Terwujudnya informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	Data Kebutuhan Pengembangan kompetensi ASN	Dokumen	1
6	Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah terlaksananya tugas dan ketetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1
7	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pelatihan yang telah diikuti	Jam Pelajaran	20

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN



MUKHDAN, S.E

Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



MUHAMMAD RIFKI DARMAWAN, S.Tr.IP

Penata Muda (III/a)

NIP. 199905202022081001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL SYAHRANI**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan pedoman dan petunjuk untuk mengetahui macam, metode dan teknis dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data permohonan sebagai bahan usulan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;
3. Membuat daftar rekapitulasi kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;
4. Membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;
5. Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
6. Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun
8. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

9. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
**PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**



MUKHDAN, SE

Penata / III/c
NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



ABDUL SYAHRANI
Pengatur TK I / II/d
NIP. 19781209 200701 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mengumpulkan pedoman dan petunjuk untuk mengetahui macam, metode dan teknis dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Jumlah pedoman dan petunjuk, metode dan teknis dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Dokumen	4
2.	Mengumpulkan dan memeriksa data permohonan sebagai bahan usulan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Jumlah Mengumpulkan dan memeriksa data permohonan sebagai bahan usulan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Dokumen	4
3.	Membuat daftar rekapitulasi kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Jumlah daftar rekapitulasi kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Dokumen	4
4.	Membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;	Dokumen	4
5.	Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persentase Penyampaian dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100

6.	Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	1
7.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	Jam Pelajaran	20
8.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Tingkat Kepatuhan LHKAN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
9.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah terlaksananya tugas dan ketetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN


MUKHDAN, SE
 Penata / III/c
 NIP.19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA


ABDUL SYAHRANI
 Pengatur TK I / II/d
 NIP. 19781209 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHIRIL ANWAR**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
2. Tersedianya Data PNS Yang Akan diikutkan Pengembangan Kompetensi Melalui Coaching/Mentoring;
3. Tersedianya Surat Pemberitahuan/Surat Tugas PNS yang akan diikutkan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;
4. Tersedianya data Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN yang dilaksanakan melalui Pelatihan;
5. Tersedianya Sertifikat Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN yang dilaksanakan melalui pelatihan;
6. Tersedianya data calon peserta pelatihan;
7. Tersedianya Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti pelatihan;
8. Tersedianya Data ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;

9. Tersedianya Sertifikat pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;
10. Tersedianya Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti Pengembangan Kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;
11. Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui LHKAN paling lambat 31 Maret 2024;
12. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat tanggal 28 Januari 2024;
13. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

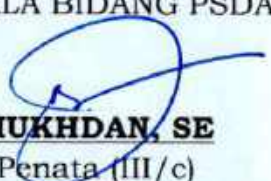
Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

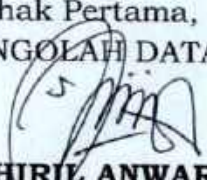
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PSDA


MUKHDAN, SE

Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA


SAHIRIL ANWAR

Pengatur Tingkat I (II/d)

NIP. 197906152007011030

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalm 1 (satu) tahun	Jumlah Pelatihan yang telah diikuti	Jam Pelajaran	20
2	Tersedia Data PNS yang diikutkan dalam Pengembangan Kompetensi Melalui Coching/Mentoring	Data Hasil Pengembangan Kompetensi Melalui Coaching/Mentoring	Dokumen	1
3	Tersedia Surat Pemberitahuan/Surat Tugas PNS yang diikutkan Pengembangan Kompetensi Melalui Coching/Mentoring	Pemberitahuan/Surat Tugas PNS yang diikutkan Pengembangan Kompetensi Melalui Coching/Mentoring	Dokumen	2
4	Tersedia Data Asn yang melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kinerja	Data ASN yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja	Dokumen	1
5	Tersedia Sertifikat ASN yang Melaksanakan Peningakatan Kapasitas Kinerja	Jumlah ASN yang memperoleh Sertifikat Peningakatan Kapasitas Kinerja	ASN	590
6	Tersedia Data calon peserta Pelatihan Teknis	Data ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis	Dokumen	4
7	Tersedia Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti Pelatihan Teknis	Jumlah Surat Pemanggilan/Surat Tugas Pelatihan Teknis	Dokumen	4
8	Tersedia Data ASN yang telah Mengikuti Pelatihan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	Jumlah Data ASN yang telah Mengikuti Pelatihan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	Dokumen	1

9	Tersedia Sertifikat Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	Jumlah ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	ASN	784
10	Tersedia Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	Jumlah Surat Pemanggilan/Surat Tugas Pelatihan PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan	Dokumen	7
11	Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui SIHARKA ASN paling lambat 31 maret 2024	Dokumen laporan harta kekayaan yang disampaikan melalui aplikasi LHKAN	Dokumen	1
12	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat tanggal 28 Januari 2024	Jumlah Dokumen SKP yang telah disampaikan	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah terlaksananya tugas dan penetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1
14	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Pengembangan Kompetensi ASN Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi ASN Perangkat Daerah yang di terbitkan	Sertifikat	1560

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PSDA


MUKHDAN, SE

Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA


SAHIRIL ANWAR

Pengatur Tingkat I (II/d)

NIP. 197906152007011030



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHRIAL**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN ,SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan Pencarian.
2. Memberi lembaran pengantar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.
3. Mengelempokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sipatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan Pendistribusian.
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi.
6. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
7. Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP
8. Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Pj.KEPALA BIDANG PSDA,


MUKHDAN, SE
Penata III/c

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



SYAHRIAL

Pengatur/ II/c

NIP. 197801092012121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;	Jumlah surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;	Berkas	30
2.	Tersedianya lembaran pengantar,sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan pengendalian disposisi pimpinan;	Jumlah lembaran pengantar,sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan pengendalian disposisi pimpinan sposisi pimpinan	Berkas	20
3.	Tersedianya Pengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sipatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan Pendistribusian;	Jumlah surat atau dokumen menurut jenis dan sipatnya,sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan Pendistribusian;	Berkas	20
4.	Tersedianya Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar tertib administrasi;	Jumlah surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar tertib administrasi;	Dokumen	5
5.	Terlaksananya Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;	Jumlah hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;	Dokumen	5

6.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Jumlah Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan) kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar.	Dokumen	1
7.	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP	Jumlah Mengikuti Pelajaran Pengembangan yang telah dilaksanakan	Jam Pelajaran	20
8.	Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	1
9.	Laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui SIHARKA ASN paling lambat 31 maret 2024	Dokumen laporan harta kekayaan yang di sampaikan melalui aplikasi LHKAN	Dokumen	1
10.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah terlaksananya tugas dan ketetapan laporan pelaksanaan tugas	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Pj.KEPALA BIDANG PSDA,



MUKHDAN, SE

Penata III/c

NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



SYAHRIAL

Pengatur/ II/c

NIP. 197801092012121001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASDARI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;
2. Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;
3. Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN melalui Pelatihan Umum, Inti, dll;
4. Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN melalui Pelatihan Teknis;
5. Terpenuhinya Penyampaian Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui LHKAN paling lambat 31 Maret 2024;
6. Tersedianya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;
7. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan).
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

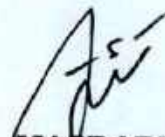
Pihak Kedua,
**PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN,**



MUKHDAN, SE

Penata / III/c
NIP. 19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



MASDARI

Pengatur Muda /II/a
NIP. 19760915 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;	Jumlah Jam Pelatihan yang telah diikuti;	Jam Pelatihan	20
2.	Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;	Jumlah Dokumentasi dan bahan laporan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;	Dokumen	1
3.	Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN melalui Pelatihan Umum, Inti, dll;	Jumlah Ketersediaan bahan laporan pelaksanaan pelatihan;	Dokumen	13
4.	Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN melalui Pelatihan Teknis;	Jumlah Ketersediaan bahan laporan pelaksanaan pelatihan Teknis;	Dokumen	21
5.	Terpenuhinya Penyampaian Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui LHKAN paling lambat 31 Maret 2024;	Jumlah Dokumen Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan melalui Aplikasi LHKAN;	Laporan	1
6.	Tersedianya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan;	Dokumen	1
7.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan).	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja.	Dokumen	1
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah terlaksananya tugas dan ketepatan laporan pelaksanaan tugas.	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN,



MUKHDAN, SE
Penata / III/c
NIP. 19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



MASDARI
Pengatur Muda / II/a
NIP. 197609152010011014



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DECKY GUNARYANA, SH**

Jabatan : **ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUKHDAN, SE**

Jabatan : **Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI**
APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;
2. Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
3. Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring;
4. Tersedianya Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikutkan Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis;
5. Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
6. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan;
7. Tersedianya data calon peserta pelatihan
8. Tersedianya Surat Pemanggilan / Surat Tugas PNS yang akan mengikuti pelatihan ;
9. Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;
10. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan;

11. Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.
12. Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024
13. Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024;
14. Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;
15. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan.
16. Terlaksananya pemetaan gerakan Eatam mengaji (GEMA) Di Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

**Pj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN**


MUKHDAN, SE
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

**Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**


DECKY GUNARYANA, SH
Penata Muda (III/a)

NIP. 197101122007011013

7.	Tersedianya data calon peserta pelatihan	Jumlah data yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan	Data	12
8.	Tersedianya Surat Pemanggilan / Surat Tugas PNS yang akan mengikuti pelatihan	Jumlah Surat Pemanggilan ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pelatihan	Surat	12
9.	Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan.	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan	Laporan	15
10.	Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.	Jumlah data pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan	Data	4
11.	Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024	Laporan harta kekayaan yang disampaikan melalui Aplikasi SIHARKA ASN	Laporan	1
12.	Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024.	SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31 Maret 2024	Laporan	1
13.	Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling lambat 28 Januari 2024.	Jumlah dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan	Dokumen	1

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20 Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun.	Jumlah Jam Pelatihan yang telah diikuti;	Jam Pelatihan	20
2.	Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.	Jumlah dokumen hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;	Data	5
3.	Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring.	Jumlah dokumen Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring	Dokumen	5
4.	Tersedianya Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikutkan Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis.	Jumlah PNS Perangkat Daerah yang akan diikutkan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring	Surat	2
5.	Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen Surat Pemberitahuan/ Surat Tugas PNS yang akan diikutkan Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring	Laporan	20
6.	Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	SK	35

14.	Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah ditetapkan)	Jumlah dokumen PK	Dokumen	1
15	Terlaksananya pemetaan gerakan Eatam mengaji (GEMA) Di Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN.	Jumlah Laporan pemetaan gerakan Eatam mengaji (GEMA) Di Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

**Pj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN**


MUKHDAN, SE
Penata (III/c)

NIP. 197407071998031005

**Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**


DECKY GUNARYANA, SH
Penata Muda (III/a)

NIP. 197101122007011013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUNAI,SE**

Jabatan : **ANALIS PENEGAKKAN INTEGRITAS DISIPLIN SDM
APARATUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ACHMAD JAIS,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN;
2. Meningkatnya Pelayanan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN;
3. Tersedianya Kebijakan Internal Instansi Tentang Penegakan Disiplin, Kode Etik dan kode perilaku ASN;
4. Terlaksananya Administrasi Pelayanan Proses ijin Perceraian Pegawai;
5. Tersedianya Dokumen Kelengkapan Hasil Temuan BPK yang di tindaklanjuti ;
6. Tersedianya Data kepatuhan penyampaian sasaran Kinerja (SKP);
7. Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja
8. Terlaksananya Tingkat ketepatan waktu input e pantau Pelaporan/Upload Dokumen Output Kegiatan Penyelesaian Proses Ijin Perceraian Pegawai;
9. Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;

10. Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan
11. Tersedianya Data Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
12. terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

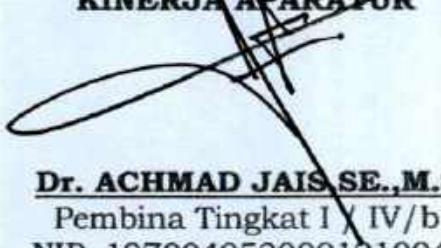
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KABID PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA APARATUR**


Dr. ACHMAD JAIS SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
**ANALIS PENEGAKKAN
INTEGRITAS DISIPLIN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR**


ZUNAEDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197608062001121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
3.	Tersedianya Kebijakan Internal Instansi tentang Penegakan Disiplin Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Jumlah Kebijakan	Dokumen	2
4.	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Proses ijin Perceraian Pegawai;	Jumlah dokumen	Dokumen	1
5.	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Hasil Temuan BPK yang di tindaklanjuti ;	Jumlah dokumen	Dokumen	1
6.	Tersedianya Data kepatuhan penyampaian sasaran Kinerja (SKP);	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
7.	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

8.	Terlaksananya Tingkat ketepatan waktu input e pantau Pelaporan/Upload Dokumen Output Kegiatan Penyelesaian Proses Ijin Perceraian Pegawai;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
9.	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Jumlah Laporan	Laporan	1
11	Tersedianya Data Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;	Jumlah Laporan	Laporan	1
12	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Jumlah Laporan	Persen	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Proses Ijin perceraian pegawai	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		50.000.000	

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
KABID PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA APARATUR


Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
ANALIS PENEGAKKAN
INTEGRITAS DISIPLIN SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR


ZUNAIDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197608062001121004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULKIFLIANSYAH, SE.**

Jabatan : **ANALIS KINERJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. ACHMAD JAIS, SE.,M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja (SKP);
2. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan SPT Tahunan;
3. Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Terlaksananya input e-Pantau Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
5. Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja;
6. Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;
7. Terlaksananya tertib Administrasi pengelolaan keuangan Sub Pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
8. Tersedianya Laporan Manajemen Risiko Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
9. Terlaksananya Penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;

10. Terlaksanya layanan SKP;
11. Tersedianya Dokumen SKP ASN direkonsiliasi;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA APARATUR**



DR. ACHMAD JAIS, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19700405 200012 1 004

Pihak Pertama,
ANALIS KINERJA



ZULKIFLIANSYAH, SE.
Penata Muda / III/a
NIP. 19780717 200701 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja (SKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Menyelesaikan Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3.	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4.	Terlaksananya input e-Pantau Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Ketepatan waktu Input e-Pantau Pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja	Jumlah Dokumen penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja	Dokumen	1
6.	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP	Persen	100
7.	Terlaksananya tertib Administrasi pengelolaan keuangan Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen dalam melaksanakan Anggaran Berdasarkan SPD atau tertib Administrasi pengelolaan keuangan	Dokumen	1
8.	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Manajemen Risiko Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1
9.	Terlaksananya Penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan	Jumlah Laporan Penilaian kinerja secara berkala	Laporan	1

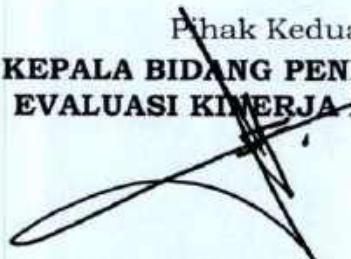
	dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja			
10	Terlaksanya layanan SKP	Jumlah Orang yang dilayani	Laporan	1
11	Tersedianya Dokumen SKP ASN direkonsilisasi	Jumlah Dokumen SKP ASN yang direkonsilisasi	Dokumen	1

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PELAKSANA PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	125.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		125.000.000	

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA APARATUR**


DR. ACHMAD JAIS, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19700405 200012 1 004

Pihak Pertama,
ANALIS KINERJA


ZULKIFLIANSYAH, SE.
Penata Muda / III/a
NIP. 19780717 200701 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHJIRIN, S.E**

Jabatan : **ANALIS KINERJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ACHMAD JAIS, SE. ,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN**

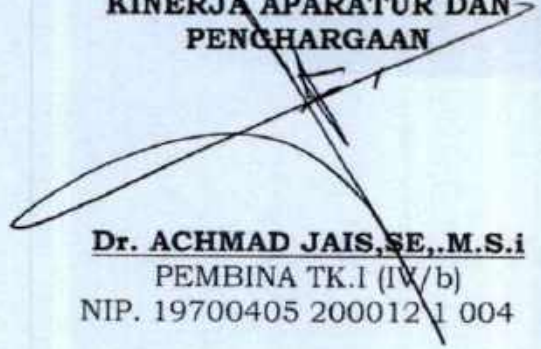
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya Dokumen SKP ASN.
2. Tersedianya Dokumen SKP yang Dinilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
3. Terlaksananya Layanan SKP.
4. Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
5. Terselesaikannya Penyampaian SPT Tahunan Aparatur Sipil Negara.
6. Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja.
7. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP.

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN
KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN**



Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.S.i
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19700405 200012 1 004

Pihak Pertama,
ANALIS KINERJA



MUHJIRIN, S.E
PENATA TINGKAT I/(III/d)
NIP. 19791130 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen SKP ASN	Jumlah SKP	Dokumen	1
2.	Tersedianya Dokumen SKP yang Dinilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Layanan SKP	Jumlah Orang Yang Dilayani	Laporan	1
4.	Melaporkan Harta Kekayaan ASN melalui LHKPN	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Per Tanggal 31 Maret 2024	Persen	100
5.	Melaporkan Penyampaian SPT Tahunan Aparatur Sipil Negara	Terselesaikannya SPT Tahunan Per tanggal 31 maret 2024	Persen	100
6.	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
7.	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN
KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN**


Dr. ACHMAD JAIS, SE.M.Si
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19700405 200012 1 004

Pihak Pertama,
ANALIS KINERJA


MUHJIRIN, S.E
PENATA TINGKAT I/(III/d)
NIP. 19791130 201101 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SADARIAH**
Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. ACHMAD JAIS, SE.,M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja (SKP);
2. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja;
5. Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;
6. Terlaksananya penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
7. Terlaksananya Layanan SKP;
8. Tersedianya Dokumen SKP ASN direkonsiliasi;

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

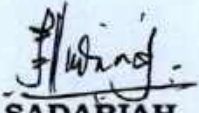
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN
KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN**


DR. ACHMAD JAIS, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19700405 200012 1 004

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA


SADARIAH
Penata Muda Tingkat I / III/b
NIP. 19770903 200012 2 002

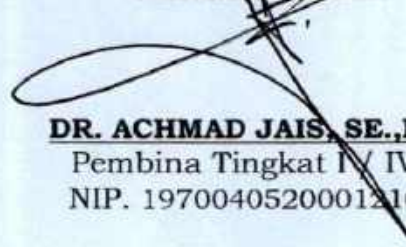
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja (SKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN	Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	1
3.	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja	Jumlah Dokumen penyusunan dan perjanjian kinerja	Dokumen	1
5.	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP	Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP	Persen	100
6.	Terlaksananya penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Jumlah Laporan Penilaian kinerja secara berkala	Laporan	1
7.	Terlaksananya Layanan SKP;	Jumlah orang yang dilayani	Laporan	1

8.	Tersedianya Dokumen SKP ASN yang direkonsiliasi;	Jumlah Dokumen SKP ASN yang direkonsiliasi	Dokumen	1
----	--	--	---------	---

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN
 KINERJA APARATUR DAN
 PENGHARGAAN**


DR. ACHMAD JAIS, SE., M.Si.
 Pembina Tingkat I / IV/b
 NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA


SADARIAH
 Penata Muda Tingkat I / III/b
 NIP. 19770903 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SERI ARMAYANTI**

Jabatan : **PENGELOLA DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ACHMAD JAIS,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Tersedianya Data Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
2. Tersedianya Data Pengelolaan Tanda Jasa bagi ASN;
3. Terlaksananya Layanan Kedisiplinan;
4. Terlaksananya Layanan Pemberian Tanda Jasa;
5. Pengelolaan Data terkait Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik ASN;
6. Tingkat Kepatuhan serta Penyampaian LHKASN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret setiap Tahun;
7. Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
8. Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

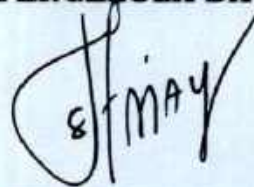
Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
**KABID PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA APARATUR**



Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



SERI ARMAYANTI
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 197902142007012011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1
2.	Tersedianya Data Pengelolaan Tanda Jasa bagi ASN;	Jumlah yang mengusulkan Penghargaan Tanda Jasa ASN	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Layanan Kedisiplinan;	Jumlah yang dilayani	Laporan	1
4.	Terlaksananya Layanan Pemberian Tanda Jasa;	Jumlah yang dilayani	Laporan	1
5.	Pengelolaan Data terkait Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik ASN;	Jumlah Dokumen Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik ASN	Dokumen	1
6.	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret setiap Tahun;	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN 100% Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100 % Pertanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100

7.	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
8.	Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja;	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
9.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

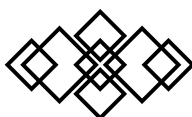
Pihak Kedua,
**KABID PENILAIAN DAN EVALUASI
 KINERJA APARATUR**

Dr. ACHMAD JAS, SE., M.Si
 Pembina Tingkat I - IV/b
 NIP. 197004052000121004

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA

SERI ARMAYANTI
 Pengatur Tingkat I - II/d
 NIP. 197902142007012011

Nota Dinas dan Notulen Rapat Evaluasi 2024



NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	:	Rapat Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan II Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	8 Juni 2024
Waktu	:	13.30 s/d selesai
Acara	:	Pembahasan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja dan anggaran Triwulan II Tahun 2024
Peserta Rapat	:	
Ketua	:	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara
Moderator	:	Kasubbag Keuangan dan Aset
Anggota	:	1. Kepala Bidang 2. Kepala Sub Bagian 3. Jabatan Fungsional 4. Staf Pelaksana
Kegiatan Rapat	:	
Pembukaan	:	Rapat di buka oleh Sekretaris BKPD M Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024
Pembahasan	:	1. Laporan realisasi pada triwulan II Penyerapan anggaran dana masih kecil yaitu 31,27% atau hanya terealisasi sebesar RP. 11.124.376.636,00 dari anggaran Rp. 35.571.385.342,- pada triwulan II kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Pelayanan Administrasi perkantoran, Pembayaran air,listrik dan Speddy serta pada bidang Pengembangan Kompetensi. 2. Arahan Sekretaris Badan untuk segera melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas. 3. Percepatan Input dan Evident E-Pantau yang sincron dengan Judul Kegiatan. 4. Percepatan melengkapi data Kegiatan pada Laporan Unit Pengelolaan Risiko per Triwulan
Tanya Jawab	:	1. Hal yang harus dilaksanakan seperti peremajaan data dan sosialisasi pengembangan SIMPEG yang pada anggaran murni masih terjadi kesalahan dalam penempatan rekening belanja. Hal ini disarankan kepada Bidang Data Formasi Pegawai untuk membuat telahaan staf terkait usulan pergeseran anggaran. 2. Hal-hal lain juga disampaikan oleh Kabd,Kasubbag sesuai dengan kendala yang ada
Kesimpulan Rapat	:	1. Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana di anggaran murni dan mengarahkan Kepala Bidang terkait untuk mengajukan telahaan staf kebagian Keuangan dan Aset yang selanjutnya dapat dibuatkan surat pergeseran apabila dibuka pergeseran anggaran oleh BPKAD.

2. Sekretaris BKPSDM memberikan arahan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas, hal ini mengacu capaian kinerja target yang telah ditetapkan
3. PPTK Memaksimalkan Input realisasi Anggaran di E-pantau sebelum tanggal 5 disetiap bulannya
4. Mengupdate dokumen Laporan UPL dan melengkapi (upload) data dukung pada Google drive yang sudah disediakan untuk masing masing PPTK

Notulis,



AJI RIFQI MIRZA, S.Kom
NIP. 198207292010011004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379

Website bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail bkpsdmkukar@mail.kukarkab.go.id Kode Pos 75511

Tenggarong, 14 Juni 2024

Nomor : P-183/SET.II/900.1.12/06/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pergeseran Anggaran Antar Obyek
Dalam Jenis Yang Sama Dalam APBD TA. 2024.

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kab. Kutai Kartanegara
Selaku Ketua TAPD
Di -

Tempat

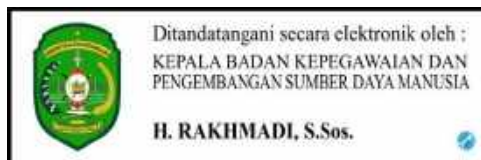
Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis yang sama dalam APBD TA. 2024, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang menyebabkan anggaran yang tersedia harus dilakukan pergeseran dan rekening baru.
2. Agar Anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Adapun daftar rincian pergeseran anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

{ttd}



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NOTULEN RAPAT

Sidang/Rapat	:	Rapat Internal Evaluasi Kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset Triwulan III Tahun 2024	
Hari/Tanggal	:	15 Juli 2024	
Waktu	:	09.00 s/d selesai	
Acara	:	Pembahasan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja dan anggaran Triwulan III Tahun 2024	
Peserta Rapat	:		
Ketua	:	Kasubbag Keuangan dan Aset	
Anggota	:	Seluruh Staf Subbag Keuangan dan Aset	
Kegiatan Rapat	:		
Pembukaan	:	Rapat di buka oleh Kasubbag Keuangan dan Aset BKPSDM sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2024	
Pembahasan	:	1. Laporan realisasi pada triwulan II Penyerapan anggaran dana masih kecil yaitu 39,14% atau hanya terealisasi sebesar RP. 13.923.110.080,00 dari anggaran Rp. 35.571.385.342,- pada triwulan II kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Pelayanan Administrasi perkantoran, Pembayaran air,listrik dan Speddy serta pada bidang Pengembangan Kompetensi. 2. Memperjelas Tugas dan Tanggungjawab dari masing masing staf di Subbag Keuangan dan Aset dengan Pembagaian Job Desc dan Lingkup Pekerjaan yang jelas untuk memaksimalkan Pelayanan Administrasi Keuangan di lingkungan BKPSDM. 3. Percepatan Input dan Evident E-Pantau yang sincron dengan Judul Kegiatan. 4. Percepatan melengkapi data Kegiatan pada Laporan Unit Pengelolaan Risiko per Triwulan	
Tanya Jawab	:	1. Hal yang harus dilaksanakan seperti peremajaan data dan sosialisasi pengembangan SIMPEG yang pada anggaran murni masih terjadi kesalahan dalam penempatan rekening belanja. Hal ini disarankan kepada Bidang Data Formasi Pegawai untuk membuat telahaan staf terkait usulan pergeseran anggaran. 2. Hal-hal lain juga disampaikan oleh Kabd,Kasubbag sesuai dengan kendala yang ada	
Kesimpulan Rapat	:	Lingkup Pekerjaan	Petugas
Pembagian Tugas Internal Subag Keuangan dan Aset		– SPP – SPM – GU – TU –	1. Mirwan Ansyari, S.E 2. Armanda Effendy. SY 3. Rina

Verifikator I

1. Bidang PKA
2. Bidang PEKA
3. Subag UMUM

Samuel Haposan B., A.Md.Ak

1. Verifikator II

- Bidang Mutasi
- Bidang PPI
- Subag Keuangan

Benny Rifani Akhta

2. GAJI, TPP, Rekap Gaji Perbulan**E-Pantau**

1. Samuel Haposan B., A.Md.Ak
2. Mirwan Ansyari, S.E

Manajemen Resiko, SPIP

1. Samuel Haposan B., A.Md.Ak
2. Kasubag

Rekap Pajak Honoror

Jayadi Saputra

RKA/DPA s/d Asistensi

1. Rina
2. Jayadi Saputra
3. Mirwan Ansyari, S.E

SSH

1. Samuel Haposan B., A.Md.Ak
2. Rina

Perjanjian Kinerja (PK)

1. Benny Rifani Akhta
2. Jayadi Saputra
3. Armanda Effendy. SY
4. Deddy Setyabudi

LKJIP

Kasubag dan TIM/POKJA (Sesuai SK)

SAKIP

1. Samuel Haposan B., A.Md.Ak
2. Jayadi Saputra
3. Mirwan Ansyari, S.E
4. TIM/POKJA (Sesuai SK, jika ada)

RENJA/RENJAP

Kasubag, TIM/POKJA (Sesuai SK)

PAKTA INTEGRITAS

1. Armanda Effendy. SY
2. Deddy Setyabudi

LPPD

1. Kasubag,
2. Samuel Haposan B., A.Md.Ak,
3. Rina

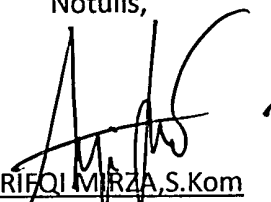
PROGNOSIS

1. Mirwan Ansyari, S.E
2. Armanda Effendy. SY

TKDN/PDN

1. Kasubag
2. Benny Rifani Akhta
3. Deddy Setyabudi

Notulis,



AJI RIFQI MIRZA, S.Kom

NIP. 198207292010011004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA

NOMOR : B. 397/BKPSDM/SET.2/784/ 07 / 2024

TENTANG

TIM

KERJA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SERTA PERENCANAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas dari urusan kesekretariatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan dan asset pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara di perlukan adanya tim Kerja ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Kerja pasa Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Perencanaan.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94).

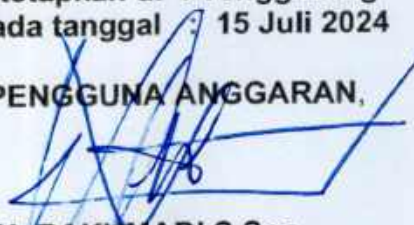
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja pasa Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Kerja pasa Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada diktum KESATU melaksanakan tugas Perencanaan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Kegiatan BKPSDM tahun anggaran 2024;
- KETIGA : Tim Kerja pasa Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Perencanaan dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 15 Juli 2024

PENGGUNA ANGGARAN,


H. RAKHMADI, S. Sos
NIP. 19660107 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
:B. 397/BKPSDM/SET.2/784/ 07 / 2024 TENTANG TIM KERJA PADA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET SERTA PERENCANAAN

**SUSUNAN TIM KERJA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SERTA
PERENCANAAN**

Nama /NIP	Jabatan	Tugas	Uraian Tugas
MIRWAN ANSYARI NIP :198312102010011023	Penyusun Laporan Keuangan	Pembuatan Tagihan dari PPTK	Membuat SPP,SPM,GU dan TU seluruh Sub Kegiatan hingga diserahkan ke loket BPKAD bagian Perben
ARMANDA EFFENDI,SY	Pengadministrasi	Membantu membuat tagihan dari PPTK (adminstrasi)	Membantu Membuat /mengadministrasikan SPP,SPM,GU dan TU seluruh Sub Kegiatan hingga diserahkan ke loket BPKAD bagian Perben
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi	Membantu membuat tagihan dari PPTK (adminstrasi)	Membantu Membuat /mengadministrasikan SPP,SPM,GU dan TU seluruh Sub Kegiatan hingga diserahkan ke loket BPKAD bagian Perben
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	Verifikator I - Bidang PKA - Bidang PEKA - Subag UMUM	- Verifikasi berkas SPP dan SPM - Verifikasi berkas SPJAN sesuai checklist - Merekap semua SPJ sesuai Tagihan baik dalam bentuk GLIS dan TU
BENNY RIVANI AKHTA NIP : 197510232009021001	Pengolah Data Laporan Keuangan	1. Verifikator II - Bidang Mutasi - Bidang PPI	- Verifikasi berkas SPP dan SPM - Verifikasi berkas SPJAN sesuai checklist

		- Subag Keuangan	- Merekap semua SPJ sesuai Tagihan baik dalam bentuk G.I.LS dan TU
		2. Membuat daftar gaji dan TPP	- Mendata pegawai dalam bentuk model D - Membuat , Merekap daftar gaji dan TPP untuk dilaporkan ke Kasubbag Keuangan dan Aset
SYARIF, SE NIP : 196912312006041062	Pj. Kasubbag Keuangan dan Aset	Input E-Pantau	- Koordinator dan mengkoordinasikan kepada Kepala Bidang untuk Verifikasi
MIRWAN ANSYARI,S.E NIP :198312102010011023	Penyusun Laporan Keuangan	Input E-Pantau	- Merekap seluruh realisasi Keuangan dan Fisik - Mengiput Relaisasi keuangan ke seluruh Sub Kegiatan - Menginformasikan ke seluruh PPTK perkembangan pengiputan E-Pantau
SAMUEL HAPOSAN BANJARNHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan		- seluruh realisasi Keuangan dan Fisik - Mengiput Relaisasi keuangan ke seluruh Sub Kegiatan - Menginformasikan ke seluruh PPTK perkembangan pengiputan E-Pantau
SYARIF, SE NIP : 196912312006041062	Pj. Kasubbag Keuangan dan Aset	Manajemen Resiko, SPIP	- Mengumpulkan Data - Menyusun Laporan Manajemen Resiko dan SPIP

SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	Manajemen Resiko, SPIP	- Mengumpulkan Data - Menyusun Laporan Manajemen Resiko dan SPIP
JAYADI SAPUTRA NIP : 198407222009011005	Pengelola Pemanfaatan BMD	Rekap Pajak Honoror	- Mengumpulkan data diseluruh Sub Kegiatan yang terdapat Honoror - Merekap semua daftar Honoror sesuai format - Memberikan /menyampaikan kepada seluruh Pegawai pada awal Tahun bersamaan dengan rekap gaji
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	RKA, DPA , KAK	- Membuat Nota Dinas untuk Pembuatan RKA manual dan Entry RKA - Mengecek seluruh sub kegiatan yang belum dientry - Asistensi RKA dan DPA keseluruhan tim TAPD
JAYADI SAPUTRA NIP : 198407222009011005	Pengelola Pemanfaatan BMD	RKA, DPA , KAK	- Asistensi RKA dan DPA keseluruhan tim TAPD - menginformasikan kepada PPTK untuk Sub Kegiatan belum di entri pada aplikasi
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi	RKA, DPA , KAK	- Merekap permasalahan dari seluruh PPTK yang tidak dapat mengentri rekening belanja ke apliakasi - Mengkoodinasikan permasalahan – permasalahan PPTK BPKAD ke

			bagian Anggaran dan Aset - Mengumpulkan KAK Seluruh Sub Kegiatan - Mencetak RKA dan DPA . - Membuat Surat untuk RKA dan Anggaran Kas Pergeseran - Menyusun/ Merekap Anggaran Kas Pergeseran sesuai Permohonan PPTK
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	Pengusulan SSH	- Membuat Nota Dinas untuk pengusulan SSH sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh BPKAD bagian ASET - Membuat kelengkapan untuk usulan SSH - Entri SSH keaplikasi SIMASTON
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi	Pengusulan SSH	- Membuat kelengkapan untuk usulan SSH - Entri SSH keaplikasi SIMASTON
BENNY RIVANI AKHTA NIP : 197510232009021001	Pengolah Data Laporan Keuangan	Perjanjian Kinerja (PK)	- Membuat Nota Dinas untuk pembuatan Perjanjian Kinerja awal Tahun dan Perubahan - Mengumpulkan Perjanjian Kinerja pada Bidang PPI
JAYADI SAPUTRA NIP : 198407222009011005	Pengelola Pemanfaatan BMD	Perjanjian Kinerja (PK)	- Mengumpulkan Perjanjian Kinerja pada Bidang

			Sekretariat dan Bidang PSDA
ARMANDA EFFENDI,SY	Pengadministrasi	Perjanjian Kinerja (PK)	- Mengumpulkan Perjanjian Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja
DEDDI SETIA BUDI NIP : 197607242007011027	Pengolah Data Laporan Keuangan	Perjanjian Kinerja (PK)	- Mengumpulkan Perjanjian Kinerja pada Bidang Mutasi dan Promosi
DEDDI SETIA BUDI NIP : 197607242007011027	Pengolah Data Laporan Keuangan	Rekap SPJ yang sudah di SCAN	- Merekap Seluruh Sub Kegiatan yang sudah Upload SPJ di Google form
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	Penyusun Laporan SAKIP	- Mengumpulkan Data untuk Pembuatan Laporan SAKIP
JAYADI SAPUTRA NIP : 198407222009011005	Pengelola Pemanfaatan BMD	Penyusun Laporan SAKIP	- Mengumpulkan Data untuk Pembuatan Laporan SAKIP
MIRWAN ANSYARI,S.E NIP : 198312102010011023	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan SAKIP	- Mengumpulkan Data untuk Pembuatan Laporan SAKIP
TIM SK		Penyusun Laporan SAKIP	
SYARIF, SE NIP : 196912312006041062	Pj. Kasubbag Keuangan dan Aset	Penyusunan RENJA / RENJA P	- Menyusun RENJA dan RENJA P
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan	Penyusunan RENJA / RENJA P	- Membantu menyusun RENJA dan RENJA P
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi	Penyusunan RENJA / RENJA P	- Membantu menyusun RENJA dan RENJA P - Membantu mengentri anggaran ke Aplikasi RPJMD - Membuat Kertas Kerja Anggaran
TIM SK		Penyusunan RENJA / RENJA P	

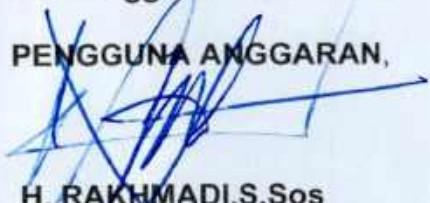
DEDDI SETIA BUDI NIP : 197607242007011027	Pengolah Data Laporan Keuangan	Pengumpulan Fakta Integritas	- Mengumpulkan dan Menscan Fakta Integritas seluruh Pegawai BKPSDM
ARMANDA EFFENDI,SY	Pengadministrasi	Pengumpulan Fakta Integritas	- Mengumpulkan dan Menscan Fakta Integritas seluruh Pegawai BKPSDM
SYARIF, SE NIP : 196912312006041062	Pj. Kasubbag Keuangan dan Aset	Penyusunan IKK LPPD	- Mengumpulkan Data IKK - Membuat /Menyusun IKK sesuai Format yang ada
SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.Md. AK NIP : 199905082022011002	Verifikator Keuangan		- Membantu Mengumpulkan Data IKK - Membantu Membuat /Menyusun IKK sesuai Format yang ada
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi		- Membantu mengumpulkan Data IKK - Membantu membuat /Menyusun IKK sesuai Format yang ada
MIRWAN ANSYARI NIP :198312102010011023	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusunan Prognosis	- Menyusun Prognosis kegiatan persemester
ARMANDA EFFENDI,SY	Pengadministrasi		- Membantu Menyusun Prognosis kegiatan persemester
SYARIF, SE NIP : 196912312006041062	Pj. Kasubbag Keuangan dan Aset	Laporan /Penyusunan TKDN /PDN	- Membuat/merekap TKDN /PDN pada rekeming belanja Seluruh Sub Kegiatan
BENNY RIVANI AKHTA NIP : 197510232009021001	Pengolah Data Laporan Keuangan		- Membuat/merekap TKDN /PDN pada rekeming belanja Seluruh Sub Kegiatan

DEDDI SETIA BUDI NIP : 197607242007011027	Pengolah Data Laporan Keuangan		Membuat/merekap TKDN /PDN pada rekeming belanja Seluruh Sub Kegiatan
JAYADI SAPUTRA NIP : 198407222009011005	Pengelola Pemanfaatan BMD	Pendataan Barang	- Mencatat barang milik daerah yang diperbaiki atau dipelihara ke dalam kartu pemeliharaan - Menyiapkan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dan semesteran (LBPS) - Menyiapkan laporan inventarisasi barang milik daerah setiap lima tahun - Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak digunakan lagi - Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah - Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah - Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah - Membantu mengamankan barang milik daerah - Menyiapkan dokumen pengajuan usulan

			pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
BENNY RIVANI AKHTA NIP : 197510232009021001	Pengolah Data Laporan Keuangan	Pendataan Barang	Membantu Pengurus Barang dalam inventarisasi barang milik
DEDDI SETIA BUDI NIP : 197607242007011027	Pengolah Data Laporan Keuangan	Pendataan Barang	Membantu Pengurus Barang dalam inventarisasi barang milik
RINA DWI HARTANTY	Pengadministrasi		Membantu Adminitrasi Keuangan
ARMANDA EFFENDI,SY	Pengadministrasi		Membantu Adminitrasi Keuangan

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 15 Juli 2024

PENGGUNA ANGGARAN,


H. RAKHMADI, S. Sos
NIP. 19660107 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379

Website bkpsdmkukarkab.go.id E-mail bkpsdmkukarumum@gmail.com Kode Pos 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Sekretaris, Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 19 Agustus 2024
Nomor : B-30/SET.II/900/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

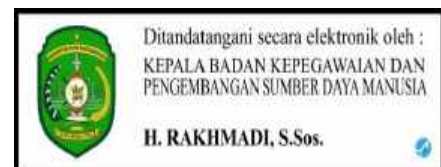
Dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan atas realisasi fisik dan keuangan dan capaian kinerja khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk itu dimohon kehadiran Bapak/Ibu Sekretaris, Pejabat Administrator dan Seluruh PPTK pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Agustus 2024
Tempat : Novotel Balikpapan
Jam : 08.00 s/d Selesai
Acara : **Evaluasi Kegiatan dan Realisasi Keuangan bulan Juli dan Agustus serta Perencanaan Kegiatan untuk Tahun 2024.**

Berkenaan dengan hal tersebut mohon untuk dapat menghadiri kegiatan dimaksud dan untuk biaya yang timbul dalam kegiatan ini menggunakan anggaran dari masing-masing Bidang/Bagian yang menugaskan, Panitia hanya menyediakan Konsumsi pada saat Kegiatan dan untuk lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Jayadi Saputra Cp. 082254175990.

Demikian kami sampaikan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

\$(ttd)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung E Lantai III Kode Pos 75511
Telp/Fax. (0541) 6666379 Website : bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail : bkpsdm@mail.kukarkab.go.id
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 E-mail : pengaduanbkpsdmkukar1@gmail.com

NOTA - DINAS

Kepada : Seluruh PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tanggal : 6 September 2024

Nomor : P-32/SET.II/900.1.15/09/2024

Sifat : PENTING

Lampiran : SOP Penggunaan Geotag dalam Dokumen Bukti Pencairan Dana Perjalanan
Dinas

Hal : Dokumen Pendukung Pertanggung Jawaban Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan:

1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86 Tahun 2023 per tanggal 28 November 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas,
3. Surat Edaran Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-3456/BPKAD/BAP/900/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pedoman Teknis Dokumen Pertanggungjawaban Belanja, dan
4. Standar Operasional Prosedur Nomor P-216/SET.II/100.3.6/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Penggunaan *Geotag* dalam Dokumen Bukti Pencairan dana Perjalanan Dinas yang terdapat pada lampiran 1 nota dinas ini.

Bersama ini disampaikan kepada seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara agar Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Biaya / Perjalanan Dinas dalam Kota melampirkan Kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas (SPT);
2. Surat Undangan/Telaahan Staff (TS) yang telah didisposisi persetujuan oleh pimpinan;

3. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah bertanda-tangan oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
4. rincian perhitungan pengeluaran rill biaya Perjalanan Dinas;
5. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
6. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
7. bukti pembayaran yang sah untuk pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
8. laporan Perjalanan Dinas; dan
9. dokumentasi/foto kegiatan pelaksana Perjalanan Dinas sesuai dengan SOP nomor P-216/SET.II/100.3.6/09/2024.

Adapun ketentuan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 9 (sembilan) hari;
2. Telaahan Staff dibuat jika:
 - a) perjalanan dinas tidak berdasarkan undangan, sebagai contoh: koordinasi, monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - b) pegawai yang bersangkutan melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 9 Hari di bulan tersebut.
3. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah dilegalisasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan basil perjalanan dinas dan kelengkapan lainnya.

Demikian untuk kesediaan dan kerjasama yang baik di sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung F Lantai III Telp. (0541) 6666379.
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 Email : PENGADUANBKPSDMKUKARI@gmail.com
Tenggarong 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Pejabat Struktural dan PPTK
Dari : KEPALA
Tanggal : 25 Oktober 2024
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III serta Rencana Kerja Bulan November dan Desember Tahun 2024

Dalam rangka Optimalisasi capaian kinerja fisik dan keuangan pada Triwulan III dan Rencana Kerja Bulan November dan Desember Tahun 2024 Sehubungan telah berjalannya kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami mengundang Sdr. (i) Pejabat Struktural dan PPTK untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Pukul : 08.30 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat BKPSDM
Acara : Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III dan Rencana Kerja Bulan November, Desember Tahun 2024

PPTK tiap bidang agar menyiapkan dan mempresentasikan data Renca Kerja Bulan November dan Desember untuk meningkatkan Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024 pada saat Rapat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

\$(ttd)

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
H. RAKHMADI, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung F Lantai III Telp. (0541) 6666379.
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 Email : PENGADUANBKPSDMKUKARI@gmail.com
TENGGARONG 75511

NOTA – DINAS

Kepada Seluruh PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab. Kukar
Dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia
Tanggal 29 November 2024
Nomor S-46/SET.II/900/11/2024
Sifat SEGERA
Lampiran -
Hal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Dan Pembayaran
 Hasil Pekerjaan Tahun 2024

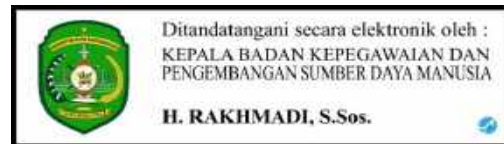
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pembayaran hasil pekerjaan Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara guna pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2024 juga mengingat Cuti Kepala Badan pada 8—22 Desember 2024, waktu efektif tersisa sekitar 14 (Empat Belas) hari. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tersedia SPD-nya agar dilakukan rekapitulasi dan segera disampaikan bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja kepada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 Desember 2024 selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk pembayaran melalui GU dan LS.
2. Diharapkan sampai pada akhir tahun anggaran 2024 seluruh belanja kegiatan/sub kegiatan terbayarkan sehingga tidak terdapat utang belanja tahun 2024.
3. Jika dirasa kegiatan/sub kegiatan ada yang tidak bisa terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, untuk diinventarisasi dan melaporkannya ke Sub Bagian Keuangan dan Aset secepatnya.
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat bersinergi melakukan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan seluruh kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga target penyelesaian sampai akhir tahun tercapai.
5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya terhadap waktu serta dana yang tersedia dengan tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan Nota Dinas ini dapat menghubungi Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

\$(ttd)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung F Lantai III Telp. (0541) 6666379.
Telpon/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 Email : PENGADUANBKPSDMKUKARI@gmail.com
Tenggarong 75511

NOTA – DINAS

Kepada : Seluruh PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab. Kukar
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Tanggal : 12 Desember 2024
Nomor : P-89/SET.II/900/12/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN
PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN TAHUN 2024

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pembayaran hasil pekerjaan Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara guna pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

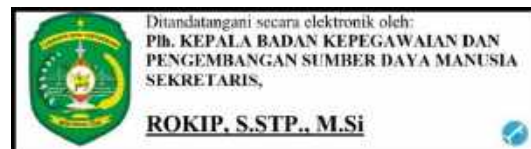
1. Dilakukan Rapat kepada seluruh PPTK pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 13 Desember 2024
Pukul : 09:00 WITA
Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Lt. 3
Acara : Rapat optimalisasi proses pencairan keuangan untuk TA. 2024
2. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tersedia SPD-nya agar dilakukan rekapitulasi dan segera disampaikan bukti pertanggungjawaban (SPJ) belanja kepada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 Desember 2024 selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk pembayaran melalui GU dan LS.
3. Diharapkan sampai pada akhir tahun anggaran 2024 seluruh belanja kegiatan/sub kegiatan terbayarkan sehingga tidak terdapat utang belanja tahun 2024.
4. Jika dirasa kegiatan/sub kegiatan ada yang tidak bisa terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, untuk diinventarisir dan melaporkannya ke Sub Bagian Keuangan dan Aset secepatnya.
5. Seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat bersinergi melakukan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan seluruh kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya masing-masing sehingga target penyelesaian sampai akhir tahun tercapai.

6. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan tingkat efektifitas dan efesiensi pelaksanaanya terhadap waktu serta dana yang tersedia dengan tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan Nota Dinas ini dapat menghubungi Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

\$(ttd)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Gedung F Lantai III Telp. (0541) 6666379.
Telp/SMS/WA Khusus Pengaduan : 0811598687 Email : PENGADUANBKPSDMKUTAI@gmail.com
TENG GARONG 75511

NOTULEN

- Rapat : Percepatan Penyelesaian Pekerjaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan Tahun 2024
- Hari / Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024
- Waktu Rapat : 09.00 s/d Selesai
- Acara rapat : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
- Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pimpinan Rapat : **ROKIP, S.STP., M.Si** (Sekretaris BKPSDM)
- Peserta Rapat : Pejabat Esselon dan PPTK di Lingkungan BKPSDM
- Kata Pembuka : Rapat dibuka oleh Sekretaris BKPSDM dan meminta Kasubag Keuangan dan Aset BKPSDM untuk memaparkan sekilas tentang materi rapat sebelum dilakukan pembahasan bersama antar bidang, berikut ini adalah pokok-pokok materi yang menjadi bahan Rapat :
1. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan s/d 12 Desember 2024
 2. Permasalahan proses pengajuan Pembayaran yang terkendala dikarenakan Kepala Badan dalam masa Cuti UMROH dari tanggal 8 s/d 20 November 2024.
 3. Proses Pengisian Input E-Pantau yang belum sinkron antara data Paket dan data Keluaran.
 4. Realisasi dari Rencana Tindakan lanjut dari dokumen Manajemen Resiko (Laporan UPR)

Hasil Pembahasan Rapat :

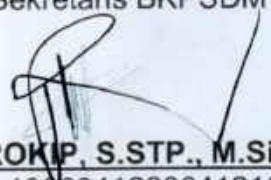
1. Terhadap 17 Sub Kegiatan yang realisasinya masih dibawah 60%, sementara kenyataan dilapangan sudah dilaksanakan tetapi belum dapat di SPJ-kan, agar segera menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan pendukungnya, untuk mempercepat proses realisasi Keuangan.
2. dapat perubahan dalam proses pelaporan e-pantau dengan mengupload hasil realisasi kegiatan setiap bulan pada tahun berjalan;
3. Setiap PPTK wajib menyiapkan laporan bulanan e-pantau beserta dokumen pendukungnya untuk sub kegiatan yang diampunya; dan

4. Untuk sub kegiatan yang mengalami perubahan indikator kinerja dan target kinerja maka penentuan persentase progres pelaksanaan kegiatan menyesuaikan target kinerja yang tercantum dalam dokumen renstra.

Kesimpulan : 1. Realisasi Keuangan s/d minggu pertama Desember 2024 sebesar Rp. 26.507.026.227,00 atau 75,41%
2. Progres Pelaksanaan Kegiatan s/d Desember 2024 sebesar 72,21%
3. PPTK segera melengkapi semua berkas untuk kebutuhan pencarian, dengan harapan begitu pak Kaban balik Umroh tinggal minta tanda tangan saja.
4. PPTK berkoordinasi dengan Subbag Keuangan dan Aset untuk kelengkapan berkas penagihan yang diperlukan.
5. Berkoordinasi dengan BPKAD untuk penerbitan SPD sesuai kebutuhan.

Tenggarong, 13 Desember 2024

Pimpinan Rapat,
Sekretaris BKPSDM


ROKIP, S.STP., M.Si
NIP. 198604122004121001